



BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU

2025

**LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025 dapat diselesaikan penyusunannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini sangat diperlukan guna memberikan informasi kinerja yang terukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan serta upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasarannya.

Penyusunan Laporan Kinerja ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, untuk itu atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan diucapkan terima kasih.

Baubau, Februari 2026

**Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Baubau**



MUHAMMAD MASSAD, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710418 200212 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 Sumber Daya Aparatur	7
1.5 Sarana dan Prasarana	14
1.6 Permasalahan Strategis	15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau	18
2.3 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah...	19
2.4 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	20
2.5 Perjanjian Kinerja	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	30
A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	32
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	35
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra Bapenda.....	37
D. Perbandingan Porsi PAD terhadap APBD	39
E. Capaian Kinerja Khusus Pajak Dan Retribusi Daerah Bapenda.....	43
F. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan	52
G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
H. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	58
3.2 Akuntabilitas Keuangan Bapenda Tahun Anggaran 2025	69
BAB IV. PENUTUP	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional	7
Tabel 1.2	Nama Jabatan Struktural dan Fungsional Umum ASN	8
Tabel 1.3	Tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.4	Sistem Pendapatan Daerah Kota Baubau	11
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Bapenda Kota Baubau 2024 - 2026	13
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah pada RPD Tahun 2024 - 2026	18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahunan Bapenda Kota Baubau Tahun 2025	18
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan Bapenda Kota Baubau Tahun 2025	22
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017...	28
Tabel 3.2	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	28
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Bapenda Kota Baubau Tahun 2025	29
Tabel 3.4	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025	30
Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Capaian Kinerja Peningkatan PAD Tahun 2025	31
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025	33
Tabel 3.7	Capaian Realisasi Kinerja terhadap Target RPJMD Bapenda Tahun 2025	34
Tabel 3.8	Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Tahun 2025	35
Tabel 3.9	Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2020 s.d Tahun 2025	36
Tabel 3.10	Realisasi DOFD Kota Baubau Tahun 2024 - 2026	38
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Penerimaan PAD pada OPD Pengelola PAD Kota Baubau Tahun 2025	39
Tabel 3.12	Capaian OPD Pengelola PAD Tahun 2025	43
Tabel 3.13	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	45
Tabel 3.14	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
Tabel 3.15	Capaian Kinerja per Sub Kegiatan Tahun 2025	50
Tabel 3.16	Komposisi Belanja Bapenda Kota Baubau Tahun 2025	55
Tabel 3.17	Realisasi Belanja Bapenda Kota Baubau Tahun 2025	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau	6
Gambar 3.1	Pie Chart Realisasi Pajak Daerah terhadap Realisasi PAD Kota Baubau Tahun 2025	36
Gambar 3.2	Capaian DOFD Kota Baubau Tahun 2020 – 2025	38
Gambar 3.3	Grafik Kontribusi OPD PAD terhadap Capaian PAD Kota Baubau Tahun 2025	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Didalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sementara itu Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka melaksanakan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam pengelolaan administrasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Baubau, Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansibilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Baubau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 tahun 2021 sebagai badan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah maka Bapenda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas, Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pendapatan daerah;
2. Penyusunan rencana dan program kerja Badan;
3. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
4. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan, Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengolahan Data, Penagihan dan Pengendalian;
5. Pengelolaan Kesekretariatan, Pendataan dan Pelayanan, Penetapan dan Pengolahan Data, Penagihan dan Pengendalian;
6. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kersipan badan;
7. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
9. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya penjelasan terkait tugas dan fungsi Sekretariat dan bidang sebagai berikut.

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam Perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan daerah dan program strategis, serta koordinasi dan pelayanan administrasi di bidang pendapatan daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendapatan Daerah
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendapatan Daerah;
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Keuangan, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, penataan organisasi dan tata laksana, pengadaan dan layanan internal, pengelolaan kepegawaian, pengembangan sistem kepegawaian, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

3. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan dibidang pendataan dan pelayanan sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah. Bidang Pendataan dan Pelayanan, terdiri atas 2 (Dua) Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang pendataan dan pelayanan dibidang pendataan dan penilaian PBB-P2 dan BPHTB.
- b. Sub Bidang Pendataan Pajak Lainnya mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi di bidang pendataan dan pelayanan di bidang pendataan pajak daerah lainnya.

4. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data

Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan di bidang penetapan dan pengolahan data pajak dan retribusi daerah. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang penetapan dan pengolahan data dibidang pengolahan data.
- b. Sub Bidang Pendataan, Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang penetapan dan pengolahan data dibidang penetapan dan verifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

5. Bidang Penagihan dan Pengendalian

Bidang Penagihan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dibidang penagihan dan pengendalian. Bidang Penagihan dan Pengendalian, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:

- a. Sub Bidang Penagihan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penagihan dan Pengendalian di bidang Penagihan dan Penindakan.
- b. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penagihan dan Pengendalian di bidang Penyuluhan dan Keberatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) selaku pejabat pemberi kinerja melalui pejabat administrator. Kelompok jabatan fungsional pada Badan Pendapatan Daerah hasil penyetaraan jabatan administrasi adalah Fungsional Perencana, Fungsional Penyuluh Pajak dan Fungsional Pemeriksa Pajak.

- a. Tugas jabatan fungsional perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- b. Tugas jabatan fungsional penyuluh pajak yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan penyuluhan di bidang perpajakan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta

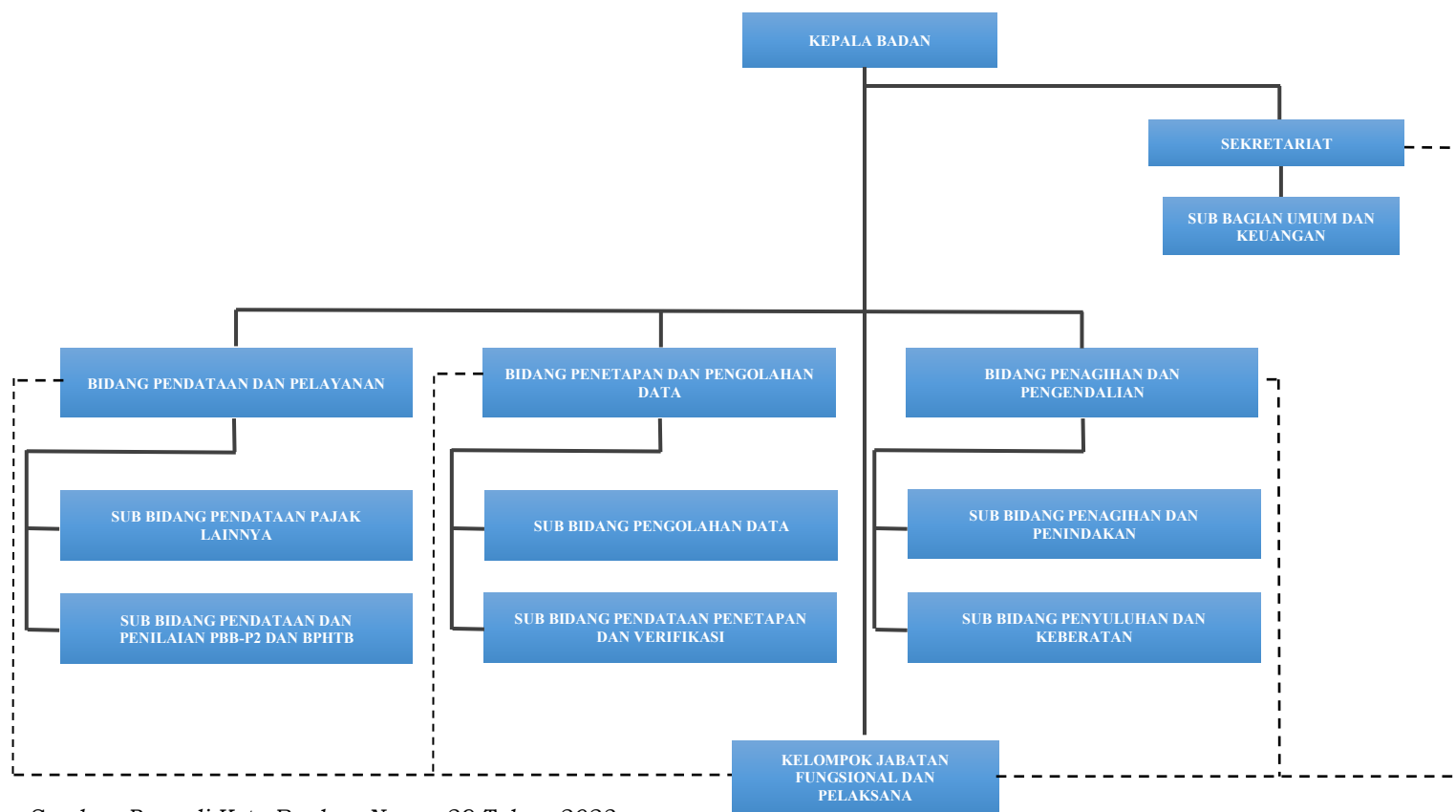
mengubah perilaku masyarakat wajib pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hal dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

- c. Tugas jabatan fungsional pemeriksa pajak yaitu melaksanakan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau sesuai Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau



Sumber: Perwali Kota Baubau Nomor 29 Tahun 2023

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Badan Pendapatan daerah Kota Baubau mempunyai pegawai ASN sebanyak 34 (Tiga Puluh Empat Orang) dan di bulan 11 terdapat 1 orang golongan III/d yang memasuki usia pensiun sehingga jumlah ASN di bulan Desember sebanyak 33 orang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah perlu didukung oleh personil atau SDM yang berkualitas dan handal. Pada saat ini Badan Pendapatan Daerah memiliki Pegawai Paruh Waktu terdaftar sebanyak 54 orang dan tidak terdaftar PPPK Paruh Waktu sebanyak 17 orang. Rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan		Eselon	Gol	Jumlah
A.	PEGAWAI ASN				
1	Struktural	Kepala Badan	II.b		
		Sekretaris	III.a	IV/b	1
		Kepala Bidang	III.b	III/d	2
		Kepala Bidang	III.b	III/c	1
		Kepala Sub Bidang	IV.a	IV/a	3
		Kepala Sub Bidang	IV.a	III/d	3
		Kepala Sub Bagian	IV.a	III/c	1
		Total Jabatan Struktural			11
2	Fungsional Tertentu	Penyuluh Pajak	IV.a	III/d	1
		Pemeriksa Pajak	IV.a	III/d	1
		Perencana	IV.a	III/c	1
		Total Jabatan Fungsional Tertentu			3
3	Fungsional Umum	Staf	JFU	III/d	4
		Staf	JFU	III/c	-
		Staf	JFU	III/b	7
		Staf	JFU	III/a	1
		Staf	JFU	II/d	3
		Staf	JFU	II/c	3
		Staf	JFU	IX	1
		Staf	JFU	V	1
		Total Jabatan Pelaksana			20
Total Pegawai ASN					34

Sumber: Data Pegawai Bapenda 2025

Ditinjau dari golongan Aparatur Sipil Negara Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Golongan IV : 4 Orang
 Golongan III : 22 Orang
 Golongan II : 6 Orang
 Golongan I : 0 Orang
 Non ASN : 71 Orang

Tabel 1.2
Nama Jabatan Struktural dan Fungsioanal Umum ASN
Bapenda Kota Baubau

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PENDIDIKA N	KET.
01	Drs. MUSRIFI, M.Si.	197312061993021001	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris	Strata - 2	Plt. Kepala Bapenda Maret s.d Desember 2025
02	FAUZIAH, SP., M.Si.	197604192008032002	Penata Tk. I, III/d	Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	Strata - 2	
03	MUHAMAD YUSUF ,SE., M.Si.	197412232007011011	Penata, III/d	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian	Strata - 2	
04	NUNARTI, S.IP.	197709302005022003	Penata, III/c	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan	Strata - 1	
05	EFENDY, SKM.,M.Kes.	196811301991031012	Pembina, IV/a	Kasubid. Pengolahan Data	Strata - 2	
06	ISMAIL HASAN, S.Kom.,M.Si.	198209052009031007	Pembina, IV/a	Kasubid. Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	Strata - 2	
07	WA ODE ARNI ACHLAN, S.Sos.	197204121992032011	Pembina, IV/a	Kasubid. Penyuluhan dan Keberatan	Strata - 1	
08	ZULFAR, S.Sos.	196711161991031005	Penata Tk. I, III/d	Kasubid. Penagihan dan Penindakan	Strata - 1	Pensiun Bulan November 2025
09	SALMATIA, SE.	198108142010012023	Penata Tk. I, III/d	Kasubid. Penetapan dan Verifikasi	Strata - 1	
10	RAHIM, S.Sos.	197009022008011011	Penata Tk I, III/d	Kasubid. Pendataan Pajak lainnya	Strata - 1	Naik Pangkat Bulan April 2025
11	SRI SUSASTRAWANTI, S.Sos.	198004172008012015	Penata, III/c	Kasubag. Umum dan Keuangan	Strata - 1	
12	WA ODE NURMALA, SE.	197802182007012007	Penata Tk. I, III/d	Fungsional Penyuluh Pajak	Strata - 1	
13	ZULKIFLI, ST.	198302262010011011	Penata Tk. I, III/d	Fungsional Pemeriksa Pajak	Strata - 1	
14	ROSNIA, SE., M.Si.	198204032010012034	Penata, III/c	Fungsional Perencana	Strata - 2	
15	HASRIYANI SADIRI, S.Kom., M.Si.	198305192010012013	Penata Tk. I, III/d	Staf Pendataan dan Penilaian PBB-P2 - BPHTB	Strata - 2	
16	ASRIANI, SE.	198506292011012024	Penata Tk. I, III/d	Staf Pendataan dan Penilaian PBB-P2 - BPHTB	Strata - 1	Masuk di Bapenda Bulan Oktober 2025
17	BAUDI MUHBAR, S.Sos.	196912312007011193	Penata Tk I, III/d	Staf Pengawasan dan Pemeriksaan	Strata - 1	Naik Pangkat Bulan April 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PENDIDIKA N	KET.
18	IMADONG, S.Sos.	197403212007011017	Penata Tk I, III/d	Staf Pelayanan dan Konsultasi	Strata - 1	Naik Pangkat Bulan April 2025
19	SYARIFUDDIN. R, SH.,M.Si.	198303102007011005	Penata Muda Tk. I, III/b	Staf Penetapan dan Verifikasi	Strata - 2	
20	HASMIN, S.Sos.	198005152014091001	Penata Muda Tk. I, III/b	Staf Penyuluhan dan Keberatan	Strata - 1	
21	SUHARWAN MAULANA ARMIN, S.STP	199608022018081002	Penata Muda Tk. I, III/b	Analisis Pendapatan	Strata - 1	
22	MULIADI, S.IP.	197205102012121002	Penata Muda Tk. I, III/b	Staf Pendataan Pajak lainnya	Strata - 1	
23	SUFRIN, S.IP.	197601202007011013	Penata Muda Tk. I, III/b	Pengurus Barang Pengguna	Strata - 1	
24	LA ODE ARIFUDDIN, S.IP.	198506222010011020	Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara Pengeluaran	Strata - 1	
25	LILIS SURIANI, S.IP.	197401072005022001	Penata Muda Tk. I, III/b	Staf Analisa dan Pengembangan	Strata - 1	
26	LA MUZI, S.I.P.	198108182010011021	Penata Muda, III/a	Bendahara Khusus Penerima	Strata - 1	
27	LA ODE AHMADUN	198002042008011008	Pengatur Tk. I, II/d	Staf Pelayanan dan Konsultasi	SMA	
28	NYOMAN SUKRA	198111302007011004	Pengatur Tk. I, II/d	Staf Penagihan dan Penindakan	SMA	
29	SYAMSURIJAL DG. NGAWING	198109102010011026	Pengatur Tk. I, II/d	Staf Penagihan dan Penindakan	SMA	
30	TAHIR BANDI	198112112013101001	Pengatur, II/c	Staf Penetapan dan Pengolahan Data	SMA	
31	TASRAN GUNAWAS	198206252014091001	Pengatur, II/c	Staf Pengolahan Data	SMA	Pindah Ke Prov. Maluku/ Gaji masih di Bapenda Baubau
32	GUSMAN AGE	197902212008011008	Pengatur, II/c	Staf Pendataan Pajak Lainnya	SMA	
33	AGUSTINA BALI, SH.	197908142025212011	Golongan IX	Staf Umum dan Keuangan	Strata - 1	Dilantik PPPK Penuh Waktu Agustus 2025
34	NUR ALAMSYAH	19740329 2025211009	Golongan V	Staf Perencanaan dan Pelaporan	SMA	Dilantik PPPK Penuh Waktu Agustus 2025

Sumber: Data Pegawai Bapenda 2025

Tabel. 1.3
Nama dan Jabatan NON ASN BAPENDA Kota Baubau
Per Desember 2025

NO.	NAMA	JABATAN	PENUAGASAN	PENDIDIKAN
	CALON PPPK PARUH WAKTU/LULUS DALAM VERIFIKASI TIM			
01	MEGAYANTI, A.Md.Komp.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	D3
02	NURLINA, A.Md.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	D3
03	DEDY KARNO, S.Pi.	Calon P3K Paruh Waktu	Sekretariat	S1
04	SYAMSIR, S.Pi.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	S1
05	IIP SRI RAHAYU RAMLI, SH.	Calon P3K Paruh Waktu	Sekretariat	S1
06	ASNI YULINAR SAIMAN, S.Kom.	Calon P3K Paruh Waktu	Sekretariat	S1
07	MAHYUDI, S.E.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	S1
08	MUHAMMAD IHSAN ARIS, S.IP.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	S1
09	IKA JUNIARSIH IDRIS, SE.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	S1
10	DIAN SETIAWATI, SH.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	S1
11	FIRDA SARI FARIHI, SE.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	S1
12	TRIFA KUSUMAWATI, SE.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	S1
13	JUMAWATI, S.Sos.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	S1
14	IRMAWATI MIMI, SE.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	S1
15	LA ODE MUKMIN, S.Pi.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	S1
16	MUHAMMAD LISANUDDIN BEDDU, S.Pd.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	S1
17	SYAMSUL ARAFAT, ST.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	S1
18	HASAN, S.IP.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	S1
19	ANDI SUWARNO SAPUTRA, SE., MM.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	S1

NO.	NAMA	JABATAN	PENUAGASAN	PENDIDIKAN
20	NURSID PAMBO, S.H.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	S1
21	MASLUDDIN ST	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	S1
22	NUR SHINTA NASIHI	Calon P3K Paruh Waktu	Sekretariat	SMA
23	ASRIAH	Calon P3K Paruh Waktu	Sekretariat	SMA
24	YULI SAMNA NDAWARI	Calon P3K Paruh Waktu	Sekretariat	SMA
25	M. REZAN SAHRU RAMADHAN	Calon P3K Paruh Waktu	Sekretariat	SMA
26	ARMIN	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	SMA
27	LA ODE YUSRON	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	SMA
28	ZURNAINI	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	SMA
29	WA ODE SAMIRAH	Calon P3K Paruh Waktu	Sekretariat	SMA
30	NUR AISYA K.	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
31	HAZLIN	Calon P3K Paruh Waktu	Sekretariat	SMA
32	SAFARUDDIN	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
33	MULIATI	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
34	SUWARTI	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	SMA
35	MASLIN	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	SMA
36	LA ODE HERDIYANTO	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	SMA
37	ABD. WAHAB	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
38	WA ODE JAWARIAH	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	SMA
39	SYAFRIL MANE	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
40	LENI ASTINA	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
41	ASNINA	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
42	MAULANA	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA

NO.	NAMA	JABATAN	PENUAGASAN	PENDIDIKAN
43	ABDUL RAJAB BARU	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
44	WA ODE MASRINA	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	SMA
45	LA ODE MUHAMMAD SACHYUN	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
46	WA ODE INDAH FARIDA AMILU	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
47	FAIDAH	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
48	LENY	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
49	NELLY NATALIA	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
50	LA MEDO	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
51	LA ODE MUHAMAD RUSTAM	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	SMA
52	L.M TAMSIR	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Pendataan Pajak lainnya	SMA
53	DESY SUCI AMALIA	Calon P3K Paruh Waktu	Staf Sub Bidang Penagihan dan Penindakan	SMA
54	SUCI QODHIMATUL JANNA, ST.	Calon P3K Paruh Waktu	Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	S-1
DATABASE BKN - LULUS VERIFIKASI TIM/ KATEGORI HIJAU TAPI TIDAK TERMUAT DALAM SK PARUH WAKTU				
01	FATMAWATI, S.Pd.,M.Si.	Non ASN	Sekretariat	S-2
02	WA ODE RISKI VILA WATI, S.E.	Non ASN	Bidang Pendataan dan Pelayanan	S-1
DATABASE BKN - TIDAK LULUS VERIFIKASI TIM				
01	NUR AGUSTINA SAIZAL RUSDY	Non ASN	Bidang Penagihan dan Pengendalian	SMA
02	GALANG RINALDY	Non ASN	Bidang Penagihan dan Pengendalian	SMA
03	MUHAMMAD FARHAN	Non ASN	Sekretariat	SMA
04	DEFIYANTI	Non ASN	Sekretariat	SMA
05	WA ODE UMI RAHMAYANTI, S.IP	Non ASN	Sekretariat	S-1
NON DATABASE BKN, MENGIKUTI TES CPNS				
01	RAHMADANI, S.Ak.	Non ASN	Bidang Penagihan dan Pengendalian	S-1

NO.	NAMA	JABATAN	PENUAGASAN	PENDIDIKAN
02	MUHAMMAD IKHSAN HUSNI, S.Ak	Non ASN	Bidang Pendataan dan Pelayanan	S-1
03	MARDIANA, S.E	Non ASN	Bidang Pendataan dan Pelayanan	S-1
04	RIZKY AWALIA, S.Kom	Non ASN	Bidang Pendataan dan Pelayanan	S-1
05	NOVA HASDAYANTI, ST.	Non ASN	Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	S-1
06	IRMAWATI, S.IP	Non ASN	Sekretariat	S-1
07	AZAR MUHBAR, S.H	Non ASN	Sekretariat	S-1
08	PUTRI ASTRI ASTUTI	Non ASN	Bidang Penagihan dan Pengendalian	SMA
09	MUHAMMAD ADNAN PRATAMA	Non ASN	Bidang Pendataan dan Pelayanan	SMA
10	MUHAMMAD DELON UBAIDILLAH	Non ASN	Bidang Penagihan dan Pengendalian	SMA
TOTAL		71 ORANG		

Demi kelancaran proses pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, maka diperlukan tambahan Pegawai dari Pegawai tidak Tetap atau Non ASN yang dikeluarkan dengan SK Walikota, hal ini sangat menunjang proses pendataan, pelayanan, penagihan dan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Ditinjau dari tingkat Pendidikan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
ASN		
1	Doktor (S3)	-
2	Strata 2 (S2)	8
3	Strata 1 (S1)/Diploma (D4)	19
4	Diploma (D3)	-
5	SLTA	7
6	SLTP	-
Jumlah ASN		34
Non ASN		
1	Doktor (S3)	-
2	Strata 2 (S2)	2
3	Strata 1 (S1)/Diploma (D4)	28
4	Diploma (D3)	2
5	SLTA	39
6	SLTP	-
Jumlah Non ASN		71
Total Pegawai		105

Sumber: Data Pegawai Bapenda 2025

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam melaksanakan tugas dan fungsi juga mempunyai sistem dalam meningkatnya pendapatan daerah, antara lain sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.5
Sistem Pendapatan Daerah Kota Baubau

NO	JENIS SISTEM	FUNGSI
1	SIMPAD	Sistem Informasi Pajak Daerah digunakan untuk : a. Membuat Ketetapan Official Assessment (Pajak Reklame) b. Pembayaran Self Assesment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan) c. Membuat laporan monitoring pendapatan dan kendali wajib pajak
2	SIMBPHTB	Sistem Informasi BPHTB digunakan untuk : a. Menerima setoran BPHTB b. Membuat verifikasi BPHTB
3	SIMPBB	Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan digunakan untuk : a. Membuat Ketetapan PBB beserta cetak masalnya b. Membuat dan mengelola pelayanan PBB (perubahan, keberatan, salinan dst) c. Untuk pembayaran dari Wajib Pajak PBB

Sumber: Data Bapenda 2025

1.6 PERMASALAHAN STRATEGIS

Permasalahan strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, yaitu :

1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pendapatan daerah yang sejalan dengan tata kelola keuangan daerah.
2. Masih belum efektifnya forum koordinasi antar OPD Penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan teruji.
4. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang patuh menaati ketentuan pembayaran perpajakan daerah secara tepat waktu dan tepat prosedur.
5. Belum meratanya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga.
6. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang ketentuan Pajak Daerah.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

A. Visi dan Misi RPJPD Kota Baubau 2005-2025

Visi dan Misi Kota Baubau pada RPJPD 2005-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kota Bau-Bau sebagai Pusat Perdagangan, dan Pelayanan Jasa yang Nyaman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya”.

Tujuan dan Sasaran Daerah yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah adalah:

Tujuan 3	: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Tujuan	: Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 3.2	: Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas
Indikator Sasaran	: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kota Baubau juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur. Hal ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan public.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau merumuskan Tujuan dan Sasaran pada RPD Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Tujuan

- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan Meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan Indikator Derajat Otonomi Fiskal Daerah.
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah bertujuan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah dengan Indikator Kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah.

2. Sasaran

- a. Sasaran Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Capaian Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah.
- b. Sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Badan Pendapatan Daerah dengan Indikator Kinerja Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan Program OPD.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Kota Baubau beserta indikator kerjanya disajikan dalam sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Bapenda Kota Baubau 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah		Derajat Fiskal Otonomi Daerah
1.1		Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah
2.1		Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Badan Pendapatan Daerah	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan Program OPD

Sumber: Data Renstra Bapenda 2024-2026

2.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BAUBAU

Setelah RPJMD Kota Baubau Tahun 2018 - 2023 berakhir, masih banyak persoalan pembangunan yang harus diselesaikan. Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dalam melakukan pengelolaan pendapatan asli daerah. Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini adalah sebagai berikut:

A. Masalah Internal

1. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau.
2. Belum optimalnya Sumber Daya Aparatur (SDM), antara lain Juru Sita, Penilai Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Penilai Aset. Ada beberapa Kualifikasi tenaga yang masih sangat terbatas jumlahnya seperti Penilai Pajak, Pemeriksa Pajak, dan Penilai Aset, adapun Juru Sita belum ada sampai saat ini.
3. Terbatasnya jumlah tenaga dan kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah, sehingga potensi pertumbuhan dan obyek pajak daerah belum terdata.
4. Belum sempurnanya Data Base potensi wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
5. Penatausahaan Retribusi belum optimal yang belum dilengkapi dengan Sistem Pendapatan yang memadai dan belum adanya prosedurnya pengelolaan Retribusi yang memadai secara elektronik.

B. Masalah Eksternal

1. Kurangnya tingkat kepatuhan dan keterbukaan wajib pajak self assesment dalam pembayaran pajak atau kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya masih rendah.
2. Sistem Administrasi Pajak yang kurang sempurna dan masih besarnya tunggakan pajak daerah, sehingga perlu penegakan disiplin yang ketat, salah satunya dengan penerapan sanksi perpajakan daerah yang tepat.
3. Kurangnya pemahaman stakeholder tentang pentingnya PAD sebagai Penerimaan Daerah.

4. Belum Optimalnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra kerja lainnya.

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi pengelola pendapatan daerah harus mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal tersebut dibutuhkan guna melihat dan menganalisis sejauh mana lingkungan dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan memahami lingkungan, baik internal maupun eksternal, sebuah organisasi dapat mempelajari kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang pada akhirnya berguna untuk menyusun sebuah rencana meningkatkan Pendapatan Daerah secara optimal.

A. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

- 1) Kurang optimalnya pengawasan pendapatan, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
- 2) Penggalian potensi dan sumber-sumber penerimaan asli daerah.
- 3) Pengintegrasian sistem aplikasi dalam pengelolaan pendapatan.
- 4) Tuntutan transparansi informasi publik.
- 5) Adanya pengaruh penyebaran Covid-19 yang berdampak kepada prioritas pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 dan dampaknya bagi ekonomi secara luas maka berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke propinsi dan kabupaten / kota seluruh Indonesia termasuk Kota Baubau, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih menitik beratkan pada urusan kesehatan, urusan pendidikan dan urusan social dan urusan pemulihan ekonomi.

B. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau adalah sebagai berikut:

- 1) Kota Baubau berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah.
- 2) Tempat pelayanan yang strategis, online sehingga mudah diakses masyarakat.
- 3) Adanya website sebagai media informasi publik.
- 4) Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
- 5) Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu. Ketiga jenis retribusi ini dimungkinkan terjadi penambahan jenis penerimaan disamping ada revisi terhadap tarif yang menyesuaikan dengan harga pasar.
- 6) Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.
- 7) Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

2.4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah
pada RPD Tahun 2024-2026

Tujuan Daerah : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik					
Sasaran Daerah : Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah berkualitas					
No.	Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	1	Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	1 Pemantapan Reformasi Birokrasi	1 Penertiban pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah
				2 Intesifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah	2 Meningkatnya penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah melalui pendataan dan penagihan berkelanjutan
				3 Menyusun Peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penegakan peraturan daerah	3 Mensosialisasikan atau penyebaran informasi terkait segala bentuk produk hukum pajak daerah dan retribusi daerah dan membangun kesadaran serta meningkatkan partisipasi Wajib Pajak untuk membayar pajak via digital
				4 Mengadakan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi	4 Memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
				5 Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur terkait pajak daerah dan retribusi daerah	5 Meningkatkan kompetensi aparatur dalam bidang pajak dan retribusi daerah

Sumber: Data Renstra Bapenda 2024-2026

2.5 PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Perjanjian kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis untuk masa waktu tahun tertentu. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Adapun perjanjian kinerja tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahunan
Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Satuan
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Fiscal Otonomi Daerah	11,39	Persen
1.1	Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah	87	Persen
		Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	88	Persen
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	Nilai
2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Badan Pendapatan Daerah	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan	100	Persen

Sumber: Data Renstra Bapenda 2024-2026

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.266.593.648,-	P-APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.227.786.650,-	P-APBD
	Jumlah	9.494.380.298,-	

Sumber: Data DPPA Bapenda 2025

Berikut 2 (Dua) program yang didukung oleh 10 (Sepuluh) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025, sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak Daerah

12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
14. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan
Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN			TARGET PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MENINGKATNYA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Percentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah	35,17%	I		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	100%	100%	2.640.770.000	2.227.786.650	(412.983.350)
	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Persentase Potensi Pajak Daerah yang ditetapkan	72%		A	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	100%	100%	2.640.770.000	2.227.786.650	(412.983.350)
		Persentase Capaian Pembayaran Pajak Daerah terhadap Ketetapan Pajak Daerah	93,0%		01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	114.500.000	(35.500.000)
		Persentase Capaian Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah	37,0%		02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	80.000.000	65.000.000	(15.000.000)
					03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	218.378.250	(81.621.750)
					04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	3 Unit	694.800.000	567.800.000	(127.000.000)
					05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	103.000.000	85.400.000	(17.600.000)
					06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	160.000.000	110.000.000	(50.000.000)
					07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5000 Obyek Pajak	3240 Obyek Pajak	227.000.000	232.592.000	5.592.000
					08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	307.970.000	279.570.400	(28.399.600)
					09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2625 Layanan	3390 Layanan	72.000.000	67.000.000	(5.000.000)
					10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	60 Dokumen	50 Dokumen	70.000.000	70.000.000	-
					11	Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	198.000.000	213.600.000	15.600.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN			TARGET PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000	40.000.000	-
					13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	158.000.000	101.229.000	(56.771.000)
					14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	80.000.000	62.717.000	(17.283.000)
2	Meningkatnya kualitas Kinerja Pembangunan Badan Pendapatan Daerah	Tingkat Capaian indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah	65,00	II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	99,95%	6.209.514.647	7.266.593.648	1.057.079.001
					A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	69.245.000	86.342.500	17.097.500
					01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	9.770.000	15.009.000	5.239.000
					02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.725.000	9.560.000	2.835.000
					03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	10.000.000	-
					04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	7.750.000	1.750.000
					05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.819.000	10.094.000	2.275.000
					06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	11.791.000	11.791.000	-
					07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	24 Laporan	14.140.000	12.140.000	(2.000.000)
					08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	9.998.500	6.998.500
					B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	99,56%	4.914.174.907	5.383.545.848	469.370.941
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	910 Orang/ Bulan	957 Orang/ Bulan	4.854.992.907	5.313.642.448	458.649.541
					02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	26.752.000	31.302.000	4.550.000
					03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.064.000	15.064.000	-
					04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	17.366.000	23.537.400	6.171.400
					C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	20.257.000	20.257.000	-
					01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.063.000	10.063.000	-
					05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.194.000	10.194.000	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN			TARGET PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					D	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	87.185.000	92.838.900	5.653.900
				07		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	87.185.000	92.838.900	5.653.900
					E	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	81.506.000	140.178.900	58.672.900
				02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	-	80.150.000	80.150.000
				03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	29.745.000	25.645.000	(4.100.000)
				05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	32.664.000	25.831.900	(6.832.100)
				06		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	4 Orang	19.097.000	8.552.000	(10.545.000)
					F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	394.636.000	446.082.500	51.446.500
				01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	4 Paket	3.000.000	10.000.000	7.000.000
				02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	12 Paket	20.000.000	20.578.700	578.700
				03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	5 Paket	5.000.000	5.000.000	-
				04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Paket	12 Paket	124.000.000	158.000.000	34.000.000
				05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket	15.000.000	15.000.000	-
				06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000	8.000.000	-
				08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	15.120.000	25.920.000	10.800.000
				09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	204.516.000	203.583.800	(932.200)
					G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	109.900.000	109.900.000
				01		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	-	18.000.000	18.000.000
				02		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	10 Unit	-	91.900.000	91.900.000
					H	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	557.769.740	885.130.000	327.360.260
				01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	8.000.000	3.000.000
				02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	147.030.000	180.030.000	33.000.000
				03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	24.000.000	5.100.000	(18.900.000)
				04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	381.739.740	692.000.000	310.260.260

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN			TARGET PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN		
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan (Rp.)	Sesudah Perubahan (Rp.)	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	84.741.000	102.318.000	17.577.000
					01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21 Unit	21 Unit	54.097.000	71.290.000	17.193.000
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	1 Unit	10.644.000	8.133.000	(2.511.000)
					06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	10.150.000	8.120.000	(2.030.000)
					09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	9.850.000	14.775.000	4.925.000
						J U M L A H			8.850.284.647	9.494.380.298	644.095.651

Sumber: DPPA Bapenda 2025 (Diolah)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010. “Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban”.

Sementara kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya *indicator output* saja, tetapi juga *outcome*, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis , terukur dan dapat diterapkan.

- a) Untuk menghitung persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah pada 11 (Sebelas) Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Baubau dengan menggunakan rumus :

- (a) Menghitung persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah}}{\text{Target Pajak dan Retribusi Daerah}} \times 100 \%$$

- (b) Menghitung Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100 \%$$

- b) Untuk menghitung persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dengan menggunakan rumus:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan Walikota Baubau tahun 2025. Pengukuran Kinerja yang ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah merupakan ketentuan penilaian Evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

A. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Sebagaimana dijabarkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025, target kinerja masih sama dengan Rencana Kerja Tahun 2025 pada APBD induk.

Tabel 3.2

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA / RUMUS
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Fiscal Otonomi Daerah	(Realisasi PAD/Realisasi Pendapatan Daerah) x 100%
1.1	Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah	(Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah/Target Pajak dan Retribusi Daerah) x 100%
		Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	(Realisasi Pajak Daerah/Target Pajak Daerah) x 100 %
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	NILAI SAKIP : AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50), D (0-30)
2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Badan Pendapatan Daerah	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan Program OPD	Rata-rata Capaian Pelaksanaan Program Penunjang + Program Prioritas x 100%

Sumber: Data Renstra Bapenda 2024-2026

Perbandingan antara Target Renstra Peningkatan PAD dan Realisasi Kinerja Peningkatan PAD di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5	
1	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Fiscal Otonomi Daerah	Persen	11,39%	15,60%	136,92%	
1.1	Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah	Persen	87,00%	90,43%	103,94%	
		Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	Persen	88,00%	91,50%	103,97%	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,00	72,56	111,63%	
2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Badan Pendapatan Daerah	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan	Persen	100,00%	99,19%	99,19%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran ini adalah SANGAT BAIK						111,13%	SANGAT BAIK

Sumber: Data IKU Bapenda 2025 (Diolah)

Target kinerja pada Renstra Bapenda tahun 2025, pada 5 (lima) Indikator kinerja memperoleh capaian sebesar 111,13%. Angka ini diperoleh dari rata-rata capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang dirumuskan pada Dokumen Renstra. Capaian tersebut merupakan:

% Capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$
% Rata-rata Capaian Kinerja	=	$\frac{\text{Jumlah Realisasi 5 Indikator}}{\text{Jumlah Target 5 Indikator}} \times 100 \%$

Penjelasan Angka Capaian Realisasi sebagaimana pada data di bawah ini:

Catatan:	
1 Derajat Fiscal Otonomi Daerah	
Realisasi PAD	140.857.410.894,00
APBD Kota Baubau	903.201.160.280,00
Persentase Capaian	15,60%
1.1 Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah	
Target Pajak Daerah	50.275.000.000,00
Target Retribusi Daerah	7.654.496.500,00
Total Target Pajak dan Retribusi Daerah	57.929.496.500,00
Realisasi Pajak Daerah	45.999.864.769,00
Realisasi Retribusi Daerah	6.382.999.045,00
Total Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	52.382.863.814,00
Persentase Capaian	90,43%
1.2 Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	
Target Pajak Daerah	50.275.000.000,00
Realisasi Pajak Daerah	45.999.864.769,00
Persentase Capaian	91,50%
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
Target Nilai SAKIP	65,00
Realisasi Nilai SAKIP	72,56
Persentase Capaian	111,63%
2.1 Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan Program OPD	
Target Capaian	100,00%
Realisasi Capaian	99,19%
Persentase Capaian	99,19%

Tabel 3.4
Realisasi Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	% 2025	Realisasi 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	897.517.868.488	872.760.889.260	97,24	944.821.024.597
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142.000.000.000	140.857.410.894	99,19	128.095.432.145
4.1.01	Pajak Daerah	50.275.000.000	45.999.864.769	91,49	37.072.106.490
4.1.02	Retribusi Daerah	7.654.496.500	6.382.999.045	83,38	6.422.153.352
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.777.187.067	10.777.187.067	100,00	10.801.442.239
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.293.316.433	77.697.360.013	106,00	73.799.730.064
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.000.000.000	140.857.410.894	99,19	128.095.432.145
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	740.989.723.888	721.885.534.249	97,42	807.311.615.239
4.2.01.01	Dana Perimbangan	-	-	0,00	766.492.876.307
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	0,00	69.108.870.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	0,00	544.316.526.798
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	0,00	59.942.034.754
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	0,00	93.125.444.755
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	26.305.355.000	29.683.825.500	112,84	-
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	552.257.652.288	548.192.510.890	99,26	-
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	117.178.992.000	104.645.059.566	89,30	-
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	695.741.999.288	682.521.395.956	98,09	766.492.876.307
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.873.937.000	6.873.937.000	100,00	5.770.331.000
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	6.873.937.000	6.873.937.000	100,00	5.770.331.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	38.373.787.600	32.490.201.293	84,66	35.048.407.932
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	38.373.787.600	32.490.201.293	84,66	35.048.407.932
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	38.373.787.600	32.490.201.293	84,66	35.048.407.932
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	740.989.723.888	721.885.534.249	97,42	807.311.615.239
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.528.144.600	10.017.944.117	68,95	9.413.977.213
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.528.144.600	10.017.944.117	68,95	9.413.977.213
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.528.144.600	10.017.944.117	68,95	9.413.977.213
	JUMLAH PENDAPATAN	897.517.868.488	872.760.889.260	97,24	944.821.024.597
6	PEMBIAYAAN DAERAH	20.440.271.020	20.440.271.020	100,00	4.609.184.767
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.440.271.020	30.440.271.020	100,00	35.514.956.013
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.440.271.020	30.440.271.020	100,00	35.514.956.013
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.440.271.020	30.440.271.020	100,00	35.514.956.013
	TOTAL APBD	927.958.139.508	903.201.160.280	97,33	980.335.980.610

Sumber: LRA Kota Baubau 2025 (Unaudit)

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan Capaian Kinerja Peningkatan PAD Tahun 2025

Tahun	PAJAK DAERAH			PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH		
	TARGET PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK DAERAH	%	TARGET PDRD	REALISASI PDRD	%
2020	28.175.000.000,00	28.536.944.268,75	101,28%	33.142.628.000,00	33.446.238.518,75	100,92%
2021	34.875.000.000,00	33.119.462.012,00	94,97%	40.228.823.000,00	38.988.868.237,00	96,92%
2022	37.170.280.000,00	36.341.269.742,00	97,77%	44.922.916.000,00	42.480.253.892,00	94,56%
2023	9.808.660.000,00	37.026.838.516,00	93,01%	48.638.869.000,00	43.503.151.720,00	89,44%
2024	45.022.765.332,00	37.072.106.490,00	82,34%	55.555.628.996,00	43.494.259.842,00	78,29%
2025	50.275.000.000,00	45.999.864.769,00	91,50%	57.929.496.500,00	52.382.863.814,00	90,43%
	% Capaian Rata-rata		93,48%	% Capaian Rata-rata		91,76%

Sumber: LRA Kota Baubau 2020-2025 (Diolah)

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa tahun 2020 s.d 2025 realisasi Pajak dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan realisasi capaian dari tahun 2025 dan rata-rata capaian masih di atas 90% atau sebesar 93,48%. Hal ini didorong adanya 2 jenis pajak baru di tahun 2025 yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak tersebut merupakan hasil pengelolaan bersama Samsat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana kepada pemerintah.

Kemampuan Daerah dalam memajukan perekonomian daerahnya salah satunya dapat dilihat dalam perkembangan PAD. Besaran PAD dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai peran dan kemampuan Daerah dalam membiayai pembangunan dan rumah tangganya sendiri (*self-supporting*).

Analisis capaian kinerja adalah hasil-hasil perhitungan dari pengukuran kinerja yang ditetapkan berbanding dengan realisasi pelaksanaannya, dimana untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program dan kegiatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahuinya pencapaian target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai, serta kemajuan - kemajuan yang dialami dan kendala yang ditemukan dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah

Adapun Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dapat ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra
Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra Tahun 2026		Capaian Renstra S/D 2024 Terhadap Target Renstra 2026
				Target Renstra	Realisasi	Capaian	Target Renstra	Realisasi Renstra	
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Fiscal Otonomi Daerah	117,36%	11%	15,60%	136,92%	11,65%	15,60%	133,87%
1.1	Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah	92,14%	87%	90,43%	103,94%	89,00%	90,43%	101,60%
		Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	96,87%	88%	91,50%	103,97%	91,00%	91,50%	100,55%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	118,95%	65,00	72,56	111,63%	69,00	72,56	105,16%
2.1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Badan Pendapatan Daerah	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan	91,11%	100%	99,19%	99,19%	100%	99,19%	99,19%
Rata-rata capaian			103,29%			111,13%			108,07%

Sumber: Data Bapenda 2025 (Diolah)

Dari indikator di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata Capaian Renstra s/d 2025 terhadap Target Renstra 2026 diperoleh hasil sebesar 108,07% dan Capaian Realisasi Renstra pada tahun 2025 sebesar 111,13%. Target Renstra Badan Pendapatan Daerah dihitung memperkirakan realisasi tahun-tahun sebelumnya, dimana kontribusi realisasi di atas 100% disumbang oleh Indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah dan Indikator Derajat Fiscal Otonomi Daerah.

Nilai Sakip Perangkat Daerah ditargetkan pada Renstra 2024 memperoleh nilai 72,56 (Baik) namun hasil penilaian APIP Kota Baubau Tahun 2025 belum ada. Nilai yang digunakan memakai nilai tahun sebelumnya (2024) sehingga persentase

capaian sebesar 111,63%. Pada Indikator Derajat Fiscal Otonomi Daerah target Renstra 2025 sebesar 11% namun DOFD yang diperoleh dari realisasi PAD terhadap APBD tahun 2025 berada pada angka 15,60% sehingga Persentase Capaian dari target DOFD sebesar 136,92%.

Tabel 3.7
Capaian Realisasi Kinerja terhadap Target RPJMD
Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Awal	2024			2025			2026		
		Perencanaan 2023	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Fiscal Otonomi Daerah	11,93%	11%	13,05%	117,36%	11,39%	16%	136,92%	11,65%		
Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah	93,01%	85%	78,32%	92,14%	87,00%	90%	103,94%	89,00%		
	Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	89,44%	85%	82,34%	96,87%	88,00%	91%	103,97%	91,00%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,94	61	72,56	118,95%	65	72,56	111,63%	69		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Badan Pendapatan Daerah	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan	91,14%	100%	91,11%	91,11%	100,00%	99%	99,19%	100,00%		
	Rata-rata Total Realisasi s/d 2025	76,15%									
	Rata-rata Target Capaian RPD Sampai dengan Tahun 2025	76,75%									
	% Capaian terhadap target RPD s/d 2025	99,22%									

Sumber: Data Bapenda 2025 (Diolah)

Persentase Rata-rata Total Realisasi sampai dengan tahun 2025 pada 5 (lima) Indikator Kinerja yaitu sebesar 76,15%. Rata-rata target capaian RPD yang akan diperoleh di tahun 2025 mencapai 76,75% dan persentase capaian terhadap target RPD sampai dengan tahun 2025 berada di angka 99,22%.

D. Perbandingan Porsi PAD terhadap APBD

Badan Pendapatan Daerah Daerah Kota Baubau berperan mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Pendapatan Daerah. Tugas Koordinasi dan fasilitasi untuk secara optimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan semua potensi yang dikelola pada masing-masing Instansi pengelola PAD.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.8
Rekapitulasi Target dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

NO	URAIAN	TARGET P -APBD	REALISASI	% CAPAIAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%
4.1.01	Pajak Daerah	50.275.000.000,00	45.999.864.769,00	91,50%
4.1.02	Retribusi Daerah	7.654.496.500,00	6.382.999.045,00	83,39%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.293.316.433,00	77.697.360.013,00	106,01%
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%

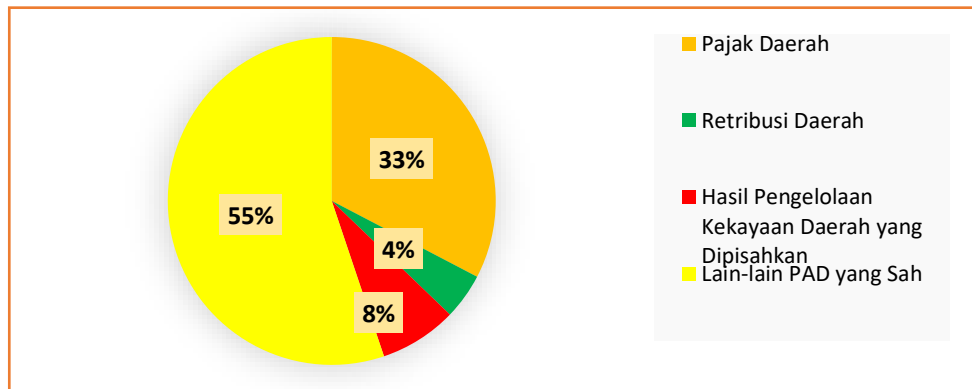
Sumber: LRA Kota Baubau 2025 (Unaudit)

Pencapaian target dan realisasi pendapatan asli daerah tersebut di atas adalah hasil koordinasi Badan Pendapatan Daerah kepada semua Organisasi Perangkat Daerah pengelola PAD secara keseluruhan .

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari masing-masing OPD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Target	Realisasi	Formula = (Realisasi / Target x 100%)	Pencapaian
142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	$= \frac{140.857.410.894,00}{142.000.000.000,00} \times 100\%$	99,20%
100%	99,20%		

Gambar 3.1
Pie Chart Realisasi Pajak Daerah Terhadap Realisasi PAD
Kota Baubau Tahun 2025



Sumber Data: Data Bapenda 2025 (Diolah)

Dari pie chart tersebut dapat dijelaskan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp140.857.410.894,00,00 yang paling besar didukung dari sumber Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp77.697.360.013,00 atau sebesar 55% yang disumbang oleh realisasi Pendapatan BLUD-RSUD sebesar Rp56.257.122.595,00 dan dari BPKAD sebesar Rp18.872.062.509,00.

Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp45.999.864.769,00 atau sebesar 33%, realisasi tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebab terdapat 2 (dua) Jenis pajak baru yaitu Pajak Opsen PKB Rp4.925.127.561,00 dan Opsen BBKBNB sebesar Rp4.360.099.242,00. Selain itu terdapat realisasi di atas 100% pada Pajak Reklame dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan menyumbang Rp10.777.187.067,00,00 atau sebesar 8% dan Retribusi Daerah sebesar Rp6.382.999.045,0000 atau sebesar 4%. Rendahnya capaian realisasi pada Retribusi Daerah dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya tidak patuhnya wajib retribusi membayar kewajibannya dan pengelolaan retribusi yang belum profesional serta pengawasan oleh Badan Pendaptan Daerah terhadap kinerja OPD Retribusi belum maksimal

Melihat data tersebut perlu digali kembali potensi-potensi Pajak dan Retribusi Daerah sehingga Kota Baubau tidak hanya mengharapkan dana transfer pusat. Kedepannya perlu langkah-langkah konkrit yang dapat dibuat oleh pembuat kebijakan guna peningkatan PAD Kota Baubau. Berikut ini dapat ditampilkan tabel realisasi Penerimaan PAD terhadap Target PAD pada APBD Kota Baubau dari tahun 2020 sampai dengan 2025.

Tabel 3.9
Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2020 s.d Tahun 2025

Tahun	Target PAD pada APBD	Realisasi PAD pada APBD	Persentase Capaian (%)
2020	102.818.041.270,00	87.008.913.500,00	84,62%
2021	111.775.067.051,00	103.754.545.119,00	92,82%
2022	114.485.468.979,00	107.053.046.908,00	93,51%
2023	119.993.283.279,00	102.719.663.642,00	85,60%
2024	125.410.033.202,00	128.084.807.145,00	102,13%
2025	142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%
Rata-rata Capaian			92,98%

Sumber : LRA Kota Baubau 2020-2025

Realisasi Penerimaan PAD setiap tahunnya fluktuatif terhadap target APBD, tahun 2025 target yang diharapkan sebesar Rp142.000.000.00,00 dapat dicapai sebesar Rp140.857.410.894,00 atau sebesar 99,20% dengan rata-rata capaian sebesar 92,98%. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya perlunya pengawasan secara aktif pada pajak dan retribusi daerah sehingga target yang ditetapkan sudah berdasarkan potensi yang nyata di Kota Baubau.

Tujuan OPD Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dengan Indikator Tujuan yaitu Derajat Otonomi Fiskal Daerah. Derajat fiskal otonomi daerah atau derajat desentralisasi fiskal adalah indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya. Derajat ini dihitung dengan membandingkan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) atau total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Emalia & Budiarty (2018), Untuk menghitung derajat otonomi fiskal sebagai berikut;

$$DOF = \frac{PAD_t}{APBD_t} \times 100\%$$

Kategori pada DOFD terbagi atas :

1. "Sangat Kurang" jika $0,00\% \leq DDF \leq 10,00\%$,
2. "Kurang" jika $10,01\% \leq DDF \leq 20,00\%$,
3. "Sedang" jika $20,10\% \leq DDF \leq 30,00\%$,
4. "Cukup" jika $30,10\% \leq DDF \leq 40,00\%$,
5. "Baik" jika $40,10\% \leq DDF \leq 50\%$ dan
6. "Sangat Baik " jika $DDF > 50\%$ (Litbang Depdagri 1991 dalam PP Hasan, 2014).

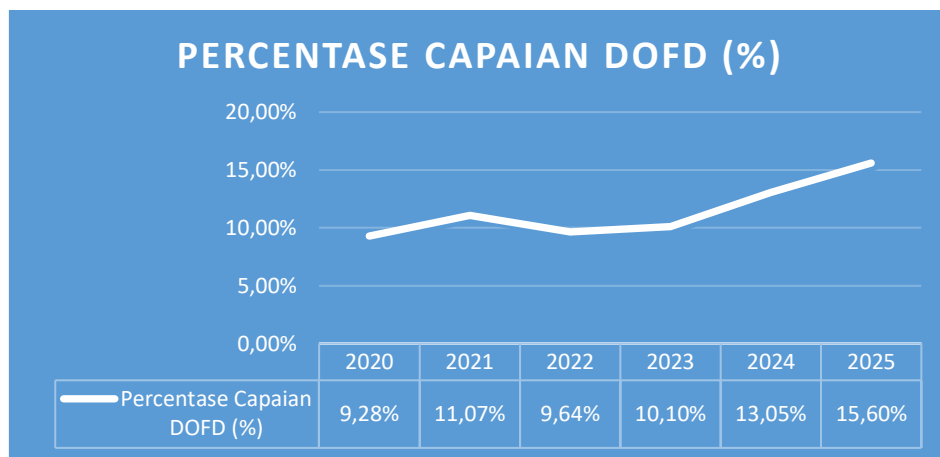
Tabel 3.10
Realisasi Derajat Otonomi Fiscal Daerah Kota Baubau
Tahun 2020 s.d 2025

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Total Realisasi Penerimaan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	Percentase Capaian DOFD (%)	Kategori	Rumus
2020	844.806.776.431,75	92.749.853.935,25	937.556.630.367,00	87.008.913.500,00	9,28%	Sangat Kurang	= (Total PAD / Total Penerimaan Daerah) x 100%
2021	860.418.787.759,00	76.751.703.757,00	937.170.491.516,00	103.754.545.119,00	11,07%	Kurang	
2022	892.074.215.918,00	218.565.033.322,00	1.110.639.249.240,00	107.053.046.908,00	9,64%	Sangat Kurang	
2023	897.087.698.529,00	120.133.542.332,00	1.017.221.240.861,00	102.719.663.642,00	10,10%	Kurang	
2024	945.678.986.307,00	35.514.956.013,00	981.193.942.320,00	128.084.807.145,00	13,05%	Kurang	
2025	872.760.889.260,00	30.440.271.020,00	903.201.160.280,00	140.857.410.894,00	15,60%	Kurang	
Rata-rata Capaian					11,46%	Kurang	

Sumber : LRA Kota Baubau 2020-2025 (Diolah)

Dari tabel di atas menunjukkan DOFD Kota Baubau yang Fluktuatif dan berkisar pada kategori Sangat Kurang dan Kurang dengan Rata-rata yang diperoleh dari Tahun 2020 s.d 2025 pada angka 11,46% pada kategori Kurang mandiri.

Gambar 3.2
Capaian Derajat Otonomi Fiscal Daerah (DOFD)
Kota Baubau Tahun 2020 – 2025



Sumber: LRA Kota Baubau 2020-2025 (Diolah)

Dari pie chart tersebut dapat dijelaskan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah tahun 2025 sebesar 15,60% pada tahun 2025, masih pada kategori Kurang namun angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

E. Capaian Kinerja Khusus Pajak Dan Retribusi Daerah OPD PAD

Secara umum pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau bersama OPD pengampu PAD pada tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan komitmen pejabat eselon II dengan Bapak Walikota Baubau, dapat dijelaskan melalui evaluasi dan analisis capaian kinerja.

PAD memiliki posisi strategis dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, karena digunakan untuk membiayai belanja pembangunan setiap tahunnya. PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Hasil Pajak Daerah, (2) Hasil Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Adapun rincian target dan realisasi PAD pada 12 OPD PAD di Kota Baubau tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini:

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah pada OPD Pengelola PAD Kota Baubau Tahun 2025

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	(Rp.)	(Rp.)	%
4	5	6			
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%
1.	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	50.782.895.000,00	46.408.153.678,00	91,39%
	4.1.01	Pajak Daerah	50.275.000.000,00	45.999.864.769,00	91,50%
	4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.032.722.250,00	103,27%
	4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.032.722.250,00	103,27%
	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.032.722.250,00	103,27%
	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.500.000.000,00	8.589.878.898,00	90,42%

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	4.1.01.15.01	PBBP2	9.500.000.000,00	8.589.878.898,00	90,42%
	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.500.000.000,00	8.589.878.898,00	90,42%
	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000.000.000,00	6.740.408.240,00	96,29%
	4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	6.000.000.000,00	6.341.461.290,00	105,69%
	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	6.341.461.290,00	105,69%
	4.1.01.16.01	BPHTB-Pemberian Hak baru	1.000.000.000,00	398.946.950,00	39,89%
	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemberian Hak baru	1.000.000.000,00	398.946.950,00	39,89%
	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	19.650.000.000,00	20.351.628.578,00	103,57%
	4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.000.000.000,00	6.344.122.756,00	105,74%
	4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	6.000.000.000,00	6.344.122.756,00	105,74%
	4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	11.400.000.000,00	11.499.863.240,00	100,88%
	4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	11.400.000.000,00	11.499.863.240,00	100,88%
	4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.500.000.000,00	1.756.330.424,00	117,09%
	4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.500.000.000,00	1.756.330.424,00	117,09%
	4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	200.000.000,00	209.811.154,00	104,91%
	4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	200.000.000,00	209.811.154,00	104,91%
	4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	550.000.000,00	541.501.004,00	98,45%
	4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	400.000.000,00	392.711.819,00	98,18%
	4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan (<i>Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor</i>)	35.000.000,00	35.087.000,00	100,25%
	4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran (<i>Bilyard dan Bowling</i>)	33.906.000,00	35.102.100,00	103,53%
	4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	16.094.000,00	8.047.000,00	50,00%
	4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	1.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	64.000.000,00	70.553.085,00	110,24%
	4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.500.000.000,00	4.925.127.561,00	75,77%
	4.1.01.20.01	Opsen PKB	6.500.000.000,00	4.925.127.561,00	75,77%
	4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	6.500.000.000,00	4.925.127.561,00	75,77%
	4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.500.000.000,00	4.360.099.242,00	67,08%
	4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	6.500.000.000,00	4.360.099.242,00	67,08%
	4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	6.500.000.000,00	4.360.099.242,00	67,08%
	4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	158.799.000,00	79,40%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	158.799.000,00	79,40%
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	158.799.000,00	79,40%
	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	200.000.000,00	158.799.000,00	79,40%

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	307.895.000,00	249.489.909,00	81,03%
	4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	50.000,00	197.000,00	394,00%
	4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	50.000,00	197.000,00	394,00%
	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	50.000,00	197.000,00	394,00%
	4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	307.845.000,00	249.292.909,00	80,98%
	4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.115.365,00	55,77%
	4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.115.365,00	55,77%
	4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	50.845.000,00	35.100.642,00	69,03%
	4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	50.845.000,00	35.100.642,00	69,03%
	4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.000.000,00	153.000,00	15,30%
	4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	850.000,00	119.600,00	14,07%
	4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	125.000,00	17.000,00	13,60%
	4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	25.000,00	12.400,00	49,60%
	4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	-	4.000,00	0,00%
	4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.500.000,00	3.655.753,00	0,00%
	4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.500.000,00	3.655.753,00	243,72%
	4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000,00	1.810.163,00	0,00%
	4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000,00	1.810.163,00	72,41%
	4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	250.000.000,00	193.432.888,00	77,37%
	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	250.000.000,00	193.432.888,00	77,37%
	4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	14.025.098,00	0,00%
	4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	-	14.025.098,00	0,00%
2	5.02.0.00.0.00.02.0000	BPKAD	28.544.808.500,00	29.649.249.576,00	103,87%
	4.1.03	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.767.621.433,00	18.872.062.509,00	106,22%
	4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	265.000.000,00	385.193.500,00	145,36%
	4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	265.193.500,00	176,80%
	4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.000.000,00	265.193.500,00	176,80%

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	115.000.000,00	120.000.000,00	104,35%
	4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	115.000.000,00	-	0,00%
	4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	120.000.000,00	0,00%
	4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.300.000.000,00	1.381.502.124,00	106,27%
	4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	150.000.000,00	204.004.426,00	136,00%
	4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	150.000.000,00	204.004.426,00	136,00%
	4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.150.000.000,00	1.177.497.698,00	102,39%
	4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangunan Guna Serah	1.150.000.000,00	1.177.497.698,00	102,39%
	4.1.04.05	Jasa Giro	1.130.000.000,00	1.712.708.397,00	151,57%
	4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.610.718.896,00	161,07%
	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.610.718.896,00	161,07%
	4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	30.491.377,00	60,98%
	4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	30.491.377,00	60,98%
	4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	38.104.625,00	76,21%
	4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	38.104.625,00	76,21%
	4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	30.000.000,00	33.393.499,00	111,31%
	4.1.04.05.07.0001	pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	30.000.000,00	33.393.499,00	111,31%
	4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.000.000,00	26.606.944,00	266,07%
	4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000,00	26.606.944,00	266,07%
	4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000,00	26.606.944,00	266,07%
	4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.400.000.000,00	3.391.861.619,00	99,76%
	4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	150.000.000,00	153.508.050,00	102,34%
	4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	150.000.000,00	153.508.050,00	102,34%
	4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.250.000.000,00	3.238.353.569,00	99,64%
	4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.250.000.000,00	3.238.353.569,00	99,64%
	4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.471.189.579,00	9.486.582.818,00	100,16%
	4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.471.189.579,00	9.486.582.818,00	100,16%
	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.471.189.579,00	9.486.582.818,00	100,16%
	4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.431.854,00	112.123.745,00	270,62%
	4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.431.854,00	112.123.745,00	270,62%
	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.431.854,00	112.123.745,00	270,62%
	4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.150.000.000,00	2.375.483.362,00	110,49%
	4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.750.000.000,00	1.682.809.237,00	96,16%
	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.750.000.000,00	1.682.809.237,00	96,16%
	4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	400.000.000,00	682.424.125,00	170,61%

NO.	KODE REKUNING	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	400.000.000,00	681.908.484,00	170,48%
	4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	19.713,00	0,00%
	4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	-	59.141,00	0,00%
	4.1.04.15.08.0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS	-	436.787,00	0,00%
	4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	10.250.000,00	0,00%
	4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	10.250.000,00	0,00%
3	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	55.809.164.000,00	59.226.804.295,00	106,12%
	4.1.02	Retribusi Daerah	809.164.000,00	795.426.700,00	98,30%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	809.164.000,00	795.426.700,00	98,30%
	4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	809.164.000,00	795.426.700,00	98,30%
	4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	605.164.000,00	530.269.000,00	87,62%
	4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkesda)	204.000.000,00	265.157.700,00	129,98%
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.000.000.000,00	58.431.377.595,00	106,24%
	4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	2.174.255.000,00	0,00%
	4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	2.174.255.000,00	0,00%
	4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	2.174.255.000,00	0,00%
	4.1.04.16	Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	56.257.122.595,00	102,29%
	4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	55.000.000.000,00	56.257.122.595,00	102,29%
	4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	55.000.000.000,00	56.257.122.595,00	102,29%
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.000.000,00	63.250.000,00	19,77%
	4.1.02	Retribusi Daerah	320.000.000,00	63.250.000,00	19,77%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	20.000.000,00	11.800.000,00	59,00%
	4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	11.800.000,00	59,00%
	4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	11.800.000,00	59,00%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	300.000.000,00	51.450.000,00	17,15%
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	51.450.000,00	17,15%
	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	51.450.000,00	17,15%
5	1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
	4.1.02	Retribusi Daerah	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%

NO.	KODE REKUNING	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan- Rusunawa	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
6	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
	4.1.02	Retribusi Daerah	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
7	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	581.532.500,00	523.913.010,00	90,09%
	4.1.02	Retribusi Daerah	581.532.500,00	523.913.010,00	90,09%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	91.212.500,00	36.057.000,00	39,53%
	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	11.100.000,00	12.326.000,00	111,05%
	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	11.100.000,00	12.326.000,00	111,05%
	4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.112.500,00	23.731.000,00	29,62%
	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.112.500,00	23.731.000,00	29,62%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	490.320.000,00	487.856.010,00	99,50%
	4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	170.120.000,00	111.173.000,00	65,35%
	4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	170.120.000,00	111.173.000,00	65,35%
	4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	320.200.000,00	376.683.010,00	117,64%
	4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	320.200.000,00	376.683.010,00	117,64%
8	2.18.0.00.0.00.02.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
	4.1.02	Retribusi Daerah	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
	4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
	4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
9	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	931.800.000,00	363.465.000,00	39,01%
	4.1.02	Retribusi Daerah	714.000.000,00	219.035.000,00	30,68%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	714.000.000,00	219.035.000,00	30,68%
	4.1.02.02.03	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	564.000.000,00	144.235.000,00	25,57%
	4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya ditempat Pelelangan - Hasil Penjualan Es Balok	564.000.000,00	144.235.000,00	25,57%
	4.1.02.02.13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	150.000.000,00	74.800.000,00	49,87%
	4.1.02.02.13.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - Retribusi Penyediaan TPI Wameo	150.000.000,00	74.800.000,00	49,87%
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	217.800.000,00	144.430.000,00	66,31%
	4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	217.800.000,00	144.430.000,00	66,31%

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	217.800.000,00	144.430.000,00	66,31%
	4.1.04.01.05.0055	Hasil Penjualan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya) - Hasil Penjualan Biota Perairan (Udang Vaname)	217.800.000,00	144.430.000,00	66,31%
	4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - Retribusi Kios Sentra Kuliner Depan Islamic Centre	-	-	
10	3.26.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
	4.1.02	Retribusi Daerah	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
	4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
	4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
11	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
	4.1.02	Retribusi Daerah	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
	4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
	4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
12	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
	4.1.02	Retribusi Daerah	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
	4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	200.000.000,00	81.781.000,00	40,89%
	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	836.000.000,00	774.250.000,00	92,61%
	-	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%

Sumber : LRA Kota Baubau 2025 (unaudit)

Dari tabel di atas nampak bahwa capaian Dinas Perhubungan sangat rendah sebesar 21, 98%. Hal ini disebabkan banyaknya potensi Retribusi Parkir pada Pasar Wameo, Pantai Kamali, Kota Mara dan beberapa titik tidak dikelola dengan baik. Adapun OPD Dinas Kesehatan memperoleh capaian yang sangat signifikan dari Penerimaan Pendapatan Dana Kapitas JKN pada FKTP. Berikut capaian PAD masing-masing OPD.

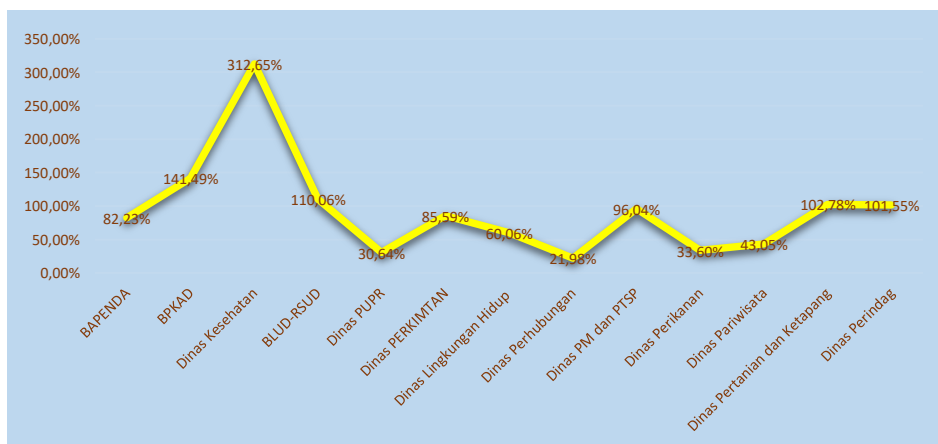
Tabel 3.12
Capaian OPD Pegelola PAD Kota Baubau Tahun 2025

NO.	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	%
01	Badan Pendapatan Daerah	50.782.895.000,00	46.408.153.678,00	91,39%
02	BPKAD	28.544.808.500,00	29.649.249.576,00	103,87%
03	Dinas Kesehatan	55.809.164.000,00	59.226.804.295,00	106,12%
04	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.000.000,00	63.250.000,00	19,77%
05	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
06	Dinas Lingkungan Hidup	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
07	Dinas Perhubungan	581.532.500,00	523.913.010,00	90,09%
08	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
09	Dinas Perikanan	931.800.000,00	363.465.000,00	39,01%
10	Dinas Pariwisata	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
TOTAL		142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%

Sumber : LRA Kota Baubau 2025 (unaudit)

Beberapa OPD telah menyumbang PAD di atas angka 100%, dari data ini dapat diambil kesimpulan bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Baubau sangat besar dan perlu digali dan dikelola dengan baik oleh OPD Pengampu PAD. Dukungan sarana dan prasarana pada pengelolaan retribusi daerah perlu dilakukan terutama pada Retribusi Parkir, retribusi Sampah, Retribusi Rusunawa dan sebagainya. Berikut Kurva capaian PAD pada OPD Pengampu.

Gambar 3.3
Grafik Kontribusi OPD PAD terhadap Capaian PAD Kota Baubau Tahun 2025



Sumber: Data PAD 2025 (Diolah)

Kontribusi PAD yang makin besar maka makin besar kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, yang berarti kinerja keuangan daerah juga semakin positif. Dalam hal kinerja keuangan positif maka bisa diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga makin tinggi derajat kemandirian suatu pemerintah daerah maka makin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai urusannya sendiri maka akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

F. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Tabel 3.13
Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja
Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis OPD	Indikator Sasaran	Target % atau Nilai	Realisasi % atau Nilai	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatn ya Kemandiria n Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah			11,39%	15,60%	136,92%	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari tahun sebelumnya sebesar 128 Milyar di tahun 2024 menjadi 140 Milyar di tahun 2025 menunjang kemandirian keuangan Daerah	Perlunya perhatian khusus terhadap sarana dan prasarana Pajak dan Retribusi Daerah yang menunjang Peningkatan Pelayanan terutama pengawasan berbasis digital pada Retribusi Persampahan, Retribusi Parkir dan Lain-lain	Upaya digitalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah menjadi langkah awal peningkatan PAD, contohnya dengan menerapkan pembayaran by Qris dan perluasan kanal pembayaran digital lainnya.
		Optimalis asi Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah	87,00%	90%	103,94%	OPD Pengelola PAD mencapai realisasi yang mendekati target resntra di sebabkan adanya penambahan potensi pajak dan retribusi di Daerah	Masih kurangnya Langkah-langkah elektronifikasi sistem pembayaran Pajak lainnya dan retribusi Daerah dan kurangnya kesadaran OPD Pengelola PAD sebagai salah satu Prioritas kegiatannya dalam peningkatan PAD	Extensifikasi pajak daerah diantaranya Pelaksanaan pendataan wajib pajak daerah secara berkala serta melakukan kerja sama dengan BPD dan BNI untuk aplikasi Qris sebagai alat pembayaran secara Online
			Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	88,00%	91%	103,97%	Adanya perpanjangan waktu pelunasan pajak terutang setelah jatuh tempo di tahun 2025 atas Piutang Pajak PBB-P2 untuk merangsang wajib pajak membayar kwajibannya serta adanya 2 jenis Pajak Opsen yang menambah nilai realisasi Pajak Daerah	Perlunya pendataan wajib pajak baru dan pengawasan secara berkelanjutan kepada Penagih Pajak dan Retribusi serta koordinasi dengan instansi terkait atas tunggakan Pajak dan Retribusi	Pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan sosialisasi maupun penyuluhan
							Melakukan Pendataan, Penagihan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah secara intens kepada Stakeholder	Kurangnya sarana dan parasana dalam melakukan Pendataan, Penagihan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah	Melakukan Pendataan, Penagihan dan Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah secara intens kepada Stakeholder
Meningkatn ya Akuntabilita s Kinerja Perangkat Bapenda	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			65	72,56	111,63%	Melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	Masih adanya Tindak lanjut yang belum terpenuhi, misalnya penyediaan Halaman Website Bapenda untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak, dan masih adanya JFT dan Staf Umum yang tidak paham Tugas Pokok dan Fungsinya.	Berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Terkait penyediaan Website Bapenda. Memberikan pemahaman kepada JFT dan JFU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
		Meningkat nya Kualitas Kinerja Pembangu nan Bapenda	Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan	100,00%	99%	99,19%	Tercapainya pelaksanaan Program dan kegiatan selama setahun dibuktikan dengan tersedianya dokumen/Laporan pendukung kegiatan	Ada sub kegiatan yang tidak dapat tercapai yaitu Gaji dan Tunjangan, disebabkan aturan pembayaran atas Insentif PDRD diperhitungkan setelah melihat selisih atas TPP Kondisi Kerja dengan realisasi Insentif PDRD per Triwulan	Memaksimalkan pencapaian program dan kegiatan urusan penunjang dan prioritas.

Sumber: Data Bapenda 2025 (Diolah)

Beberapa alasan penyebab kegagalan OPD pengampu PAD dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Badan Pendapatan Daerah, tidak maksimalnya capaian PAD disebabkan beberapa sebab antar lain:
 - 1) Pada Pajak Reklame terealisasi sebesar 103,27% hal ini didorong oleh besarnya perhatian penagih pajak daerah untuk melakukan pengawasan reklame secara rutin sejalan dengan meningkatnya transaksi reklame di tahun 2025.
 - 2) Pada Pajak Air Tanah belum ada realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 hal ini disebabkan belum adanya regulasi Peraturan Gubernur terbaru tentang pemungutan PAT sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Baubau dalam menyusun Peraturan Wali Kota tentang Pajak Air Tanah.
 - 3) Pajak Sarang Burung Wallet belum ada realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 hal ini disebabkan tidak adanya sosialisasi yang berkesinambungan kepada Wajib Pajak sehingga potensi yang ada sampai akhir tahun tidak tervalidasi dan tidak ditetapkan dan tidak dapat ditagih pada Wajib Pajak.
 - 4) Pada PBB-P2 terealisasi sebesar 90,41% termasuk pokok dan piutang. Besarnya target piutang sebesar Rp. 17 Milyar namun kemungkinan tertagih sangat kecil sehingga perlu dilakukan validasi kembali dan penagihan secara berkala. Selain itu perlunya membuat regulasi dan inovasi yang mengikat wajib pajak PBB-P2.
 - 5) Pada BPHTB terealisasi sebesar 96,29%. Adanya loss potensi disebabkan aturan terkait pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 370 OP BPHTB sehingga loss potensi yang sangat besar di tahun 2025.
 - 6) Pada PBJT secara total mencapai 103,57% dan diantaranya PBJT Makanan dan Minuman Restoran sebesar 105,73%, PBJT - Tenaga listrik 100,87%, PBJT – Jasa Perhotelan sebesar 117,08% dan PBJT Jasa Parkir sebesar 104,9%. Namun pada pajak Hburan dan Kesenian hanya mencapai 98,45%.

- 7) Pada Retribusi hanya terealisasi sebesar 83,38%. Terdapat loss potensi pada wilayah penagihan Bukit Wantiro dan Taman BRI disebabkan berkurangnya penjual yang aktif pada wilayah tersebut.
- b. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat alat berat yang menjadi sumber PAD telah berumur tua dan memerlukan perbaikan atau pemeliharaan secara menyeluruh, namun sebaiknya perlu diganti dengan alat yang baru. Terkait Retribusi penyedotan Kakus masih perlu langkah konkrit dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami pentingnya kesehatan lingkungan, perlu sosialisasi dan pendataan yang menyeluruh penggunaan kakus pada kawasan padat penduduk.
- c. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdapat kerusakan dan memerlukan pemeliharaan pada 3 Rusunawa terutama pada Rusunawa Pasar Wameo dan Rusunawa Kota Mara yang memerlukan biaya pemeliharaan yang besar namun sampai saat ini belum ada alokasi dana pemeliharaan yang dapat menunjang peningkatan PAD pada penerimaan Rusunawa.
- d. Pada Dinas Lingkungan Hidup, retribusi persampahan memiliki potensi yang besar namun tidak dapat tertagih secara menyeluruh disebabkan kurangnya petugas penagihan pada setiap kelurahan dan belum adanya kanal pembayaran online pada retribusi persampahan.
- e. Pada Dinas Perhubungan terdapat potensi parkir pada lokasi depan Toko Liwanda, pada sekitaran Toko Alberta dan pada sekitaran Kota Mara yang tidak terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan loss potensi. Pada wilayah Pasar Wameo dan Pantai Kamali seyogyanya terdapat potensi sebesar Rp. 2 milyar namun tidak dikelola dengan baik. Pada wilayah depan Rumah Sakit Siloam yang merupakan jalan propinsi dijadikan lahan parkir liar sehingga menimbulkan loss potensi pada penerimaan Pajak Parkir pada Lippo plaza Buton.
- f. Pada Dinas Perikanan, target PAD dipekirakan panen udang Vaname dapat dilakukan pada pertengahan tahun, namun bibit udang vaname tidak dapat berkembang dengan baik akibat cuaca buruk.

- g. Pada Dinas Pariwisata, potensi Retribusi Daerah pada wilayah Benteng Keraton Buton belum dapat di maksimalkan sebab belum ada fasilitas yang memadai untuk memisahkan wilayah wisatawan dan wilayah rumah penduduk, beberapa kendala juga ditemui dengan regulasi yang belum memadai ketika memungut retribusi pada Benteng Keraton Buton.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Daerah	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Kinerja Tahun 2025 (%)			Anggaran (Rp) Tahun 2025			Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah			11,39%	15,60%	136,92%	2.227.786.650	2.178.649.780	97,79%	18,53%
		Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Capaian Pajak dan Retribusi Daerah	87,00%	90%	103,94%				
			Persentase Capaian Realisasi Pajak Daerah	88,00%	91%	103,97%				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Bapenda	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			65	72,56	111,63%	7.266.593.648	5.556.060.926	76,46%	
		Meningkatnya Capaian Pelaksanaan Program Pendukung Sasaran OPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100,00%	99%	99,19%				
Rata - rata tingkat capaian						111,13%	9.494.380.298	7.734.710.706	81,47%	

Sumber: Data LRA Bapenda 2025 (Diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 81,47% dengan total Anggaran yang diberikan sebesar Rp9.494.380.298,- dapat terealisasi sebesar Rp7.734.710.706,- atau tingkat efisiensi sebesar 18,53%. Hal ini disebabkan beberapa sub kegiatan tidak dapat terealisasi dibawah 80% yaitu:

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan terealisasi sebesar 71,70% dimana terdapat Belanja Insentif atas Pajak dan Retribusi Daerah bagi ASN dan Kepala Daerah yang tidak dapat terealisasi akibat tidak tercapainya beberapa target pajak Daerah, selain itu pemberlakuan penerimaan atas selisih Insentif Pajak dan Retribusi Daerah dengan TPP Kondisi Kerja menyebabkan besarnya nilai saldo anggaran pada Rekening TPP Kondisi Kerja sebesar Rp780.724.250,- dan selisih Insentif yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp607.782.175,-. Hal ini disebabkan tidak tercapainya beberapa target pajak Daerah sampai 100% yaitu PBB-P2, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Opsen BBNKB dan Retribusi Daerah. Namun disebutkan dalam Peraturan Wali Kota Baubau tentang Tata Cara Pemungutan dan Pemanfaatan atas Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 5 dan 6 bahwa pajak dan Retribusi Daerah yang terealisasi sampai dengan 75% - 100% dan belum dicairkan di tahun berkenaan dapat dibayarkan di triwulan I tahun berikutnya. Sehingga terdapat 3 Jenis Pajak yang terealisasi dan belum dapat dicairkan di tahun 2025 yaitu Pajak Reklame 100%, Pajak PBJT 100% dan Opsen PKB 75% akan dicairkan Insentif PDRD-nya di Triwulan I tahun 2026.
- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi anggaran sebesar Rp2.552.000,- atau 29,84%, dari target anggaran sebesar Rp8.552.000,- hal ini disebabkan hanya 1 ASN yang melakukan Pendidikan dan Pelatihan secara Offline, selebihnya 3 ASN lainnya melakukan Diklat/Bimtek melalui daring/online.
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor terealisasi sebesar Rp510.547.000,- atau 73,78% dari target anggaran sebesar Rp692.000.000,- hal ini disebabkan Belanja Insentif Non ASN atas Pajak dan Retribusi Daerah bagi Non ASN yang tidak dapat terealisasi akibat tidak tercapainya beberapa target pajak Daerah sampai 100% yaitu PBB-P2, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Opsen BBNKB dan Retribusi Daerah. Namun terdapat 3 Jenis Pajak yang terealisasi dan belum dapat dicairkan di tahun 2025 yaitu Pajak

Reklame 100%, Pajak PBJT 100% dan Opsen PKB 75% akan dicairkan Insentif PDRD-nya di Triwulan I tahun 2026.

- d) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp176.365.600,- atau 80,76% dari target anggaran Rp218.378.250,- hal ini disebabkan berubahnya Sumber Dana Sub Kegiatan yang awalnya DAU-Peruntukan Bidang Pendidikan berubah menjadi Sumber Dana Pajak Daerah dan diubah di Perubahan APBD. Namun permintaan di awal tahun triwulan pertama tidak dilakukan pembatalan/tidak dihapus pada Sistem SIPD sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di DPA Perubahan.

H. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan dan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Alokasi per sasaran pembangunan tahun 2025 dapat dilihat pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, realisasi Kinerja Program yang tercapai sebesar 98,38% dari target 100% dan capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi kinerja program yang tercapai sebesar 100% dengan rata-rata tingkat capaian urusan Keuangan Badan Pendapatan Daerah sebesar 99,11%%.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja per Sub Kegiatan Tahun 2025

SASARAN	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BAPENDA		100%	99,19%			
				100%	99,19%			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Badan Pendapatan Daerah	Mengoptimalkan Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai Sumber Pendapatan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan	100%	100,00 %			
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembinaan Badan Pendapatan Daerah	Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Regulasi	100%	100%			
	Mengoptimalkan Penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya Percepatan Penerimaan Pendapatan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Tersedianya Dokumen RUP 2025 dan RUP Perubahan 2025, Dokumen Renja Perubahan 2025, Dokumen Renja 2026 dan Dokumen Renstra-PD 2025-2030		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berkoordinasi dengan BAPPEDA sebagai Motor Penggerak Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renstra dan Renja Perubahan
	Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD TA. 2026		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berkoordinasi dengan BPKAD (Bidang Anggaran) sebagai Motor Penggerak Penyusunan RKA TA. 2025
	Meningkatkan Pemahaman Masyarakat, Wajib Pajak dan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen RKA Pergeseran dan RKAP-SKPD TA. 2025		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berkoordinasi dengan

SASARAN	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Stakeholder Lainnya dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah.	Perubahan RKA-SKPD	Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					BPKAD (Bidang Anggaran) sebagai Motor Penggerak Penyusunan RKAP TA. 2025
	Soliditas Aparatur Badan Pendapatan Daerah sebagai Aktor Utama dalam Pencapaian Target Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD TA. 2025 dan Anggaran Kas		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berkoordinasi dengan BPKAD (Bidang Anggaran) sebagai Motor Penggerak Penyusunan DPA TA. 2025
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen DPA Pergeseran dan DPPA-SKPD TA. 2025		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berkoordinasi dengan BPKAD (Bidang Anggaran) sebagai Motor Penggerak Penyusunan DPPA TA. 2025
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	Tersedianya Laporan SAKIP Induk 2025 dan SAKIP Perubahan 2025 dan LAKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berkoordinasi dengan Inspektorat, Bagian Organisasi dan tata laksana, dan Bappeda
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan	24 Laporan	Tersedianya Laporan LPPK, LKPJ, Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi PJ. Wali Kota Baubau Tahun 2025		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berkoordinasi dengan Bappeda untuk Laporan Evaluasi RKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja LPPD pada Bagian Pembangunan Setda sebagai Motor Penggerak Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah TA. 2025
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	Tersedianya Laporan Wali Data dan Laporan Statistik Sektoral Daerah Tahun 2025		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	100,00 %			

SASARAN	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Peraturan Walikota Baubau No. 41 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Insentif Pajak daerah dan Retribusi daerah.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910 Orang / Bulan	957 Orang/ Bulan	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN, TPP Kondisi Kerja dan Insentif ASN, KDH/WKDH	Realisasi Anggaran tidak 100 % sebab ada beberapa insentif pajak daerah yang tidak dapat terealisasi sesuai target PAD, dan terdapat Pegawai yang Pindah dan Pensiun di tahun 2025	Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada dan Berkoodinasi dengan BPKAD Bidang Perbendaharaan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	Tersedianya dokumen pelaksanaan tugas ASN termasuk pemberian honorium kepada Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan.		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Ta. 2024 dan Laporan persiapan Pemeriksaan BPK Tahun 2024		Penyusunan Laporan Keuangan dan CALK Badan Pendapatan Daerah tetap Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada dan Berkoodinasi dengan BPKAD Bidang Akuntansi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran Bapenda Ta. 2025 dan Laporan Koordinasi terkait Laporan Keuangan bersama BPKAD		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan oleh PPK - SKPD dilakukan setelah berkoordinasi dengan PPTK dan berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada serta Berkoodinasi dengan BPKAD Bidang Akuntansi
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Tercatat dalam KIB Perangkat Daerah	100%	100%			
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang TA. 2025 dan RKBMD Perubahan Ta. 2025		Penyusunan RKBMD dilakukan sebanyak 2 kali mengikuti Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang DPA Induk dan DPA Perubahan
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi BMD dan Laporan Aset sebagai bahan rekon bersama BPKAD		Melaksanakan Rekonsiliasi atas Kartu Inventaris Barang sesuai dengan kondisi BMD yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah dengan Bidang Aset BPKAD Kota Baubau

SASARAN	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Daerah	100%	100%			
		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Tersedianya Laporan Rutin Pajak dan Retribusi Daerah oleh Bendahara Penerimaan		Merutinkan Rapat bersama OPD Pengampu Retribusi Daerah selama 4x dalam setahun
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya pada saat Baris Berbaris HUT RI		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Melakukan Koordinasi dengan BPKAD dan Kominfo dan Ortala dalam rangka pemberian TPP ASN
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	12 Dokumen	Tersedianya Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja (SKP) dan Daftar Hadir serta kelengkapan TPP ASN		Monitoring dilakukan sesuai kehadiran Absensi ASN dan Non ASN baik manual maupun by sistem Simalape untuk dasar pembayaran TPP ASN
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	4 Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN	Tidak adanya Pelatihan Teknis untuk jabatan Penyuluh Pajak, Penilai Pajak, Oprator Console, Pemeriksa Pajak dan Juru Sita	Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh ASN yang mengikuti Ujian Dinas di BKPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Tersedianya 4 Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan	12 Paket	12 Paket	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Bahan Komputer, Kertas dan		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada

SASARAN	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
		Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Cover serta Bahan Cetak		Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	Tersedianya Peralatan rumah tangga		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Tersedianya Stock Karcis bagi 8 OPD pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Tersedianya Belanja Cetak Spanduk/ Baliho dan Penggandaan Kantor		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Terfasilitasinya kunjungan tamu dengan penyediaan Makanan dan Minuman Tamu baik tamu dari dalam kota dan dari luar daerah Kota Baubau		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya penyelenggaraan rapat/koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilakukan oleh ASN dan Non ASN		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dibutuhkan	100%	100%			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 4 bagi Pejabat Eselon II selama 2 Bulan	Proses Kontrak bersama Pihak Ketiga terlambat, seharusnya bulan Oktober 2025	Percepatan Proses e-Catalog Sewa Kendaraan Dinas Pejabat Eselon 2 di DPA Perubahan untuk 2 Bulan saja November dan Desember 2025

SASARAN	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	Tersedianya Komputer, Printer dan Scanner bagi kelancaran pelaksanaan Administrasi Bapenda	Perubahan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Komputer di DPA Perubahan dari sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pajak Daerah ke Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesib Lainnya	Percepatan Proses Pengadaan Langsung atas Komputer, Printer dan Scanner setelah DPA Perubahan keluar di Bulan November 2025
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dibayarkan	100%	100%			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	Tersedianya belanja Surat Menyurat seperti Materai		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terbayarnya Rekening Lisrik, Rekening Air, 2 sewa Internet Layanan Dedicated Server Hosting dan Sewa Indihome Bapenda		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Tersedianya Sewa Tenda dan Dekorasi pada saat Kegiatan Pramuka di Lakologou Kota Baubau		Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan Penyewaan Perlengkapan Kantor pada Kemah Pramuka di Kel. Lakologou
	Surat Keputusan Walikota Nomor : 138/III/2025 Tentang Penunjukan Tenaga Administrasi Lingkup Badan Pendapatan Kota Baubau Tahun Anggaran 2025	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Terbayarnya Honorarium Non ASN dan Insentif Non ASN yang dibayarkan sesuai dengan SK yang di keluarkan Oleh Kepala SKPD dan SK Wali Kota Baubau	Realisasi anggaran atas Insentif Non ASN tidak maksimal disebabkan terdapat insentif Pajak dan Retribusi Daerah dengan capaian 100% di Bulan Desember tidak dapat diterimakan di akhir tahun 2025 namun akan dibayar di tahun 2026 Triwulan 1	Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta SK Wali Kota Baubau tentang Non ASN Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	100%	100%			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	21 Unit	21 Unit	Terpeliharanya Unit yang terpelihara 1 unit Mobil Kepala Badan dan 20 unit Motor		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada

SASARAN	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
		Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Dinas yang dibayarkan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah jatuh tempo		Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	Jumlah Unit yang terpelihara 1 unit Mobil Operasional Lapangan yang dibayarkan dan Pajak Kendaraan Bermotor yang telah jatuh tempo		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	Pemeliharaan dilakukan pada unit Printer, Unit AC dan Unit Komputer/PC/Laptop		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Terlaksananya pemeliharaan Kantor seperti pengecatan, pembersihan Taman, perbaikan selokan dan perbaikan plafon bocor		Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta Berpedoman pada Aturan-aturan Operasional yang ada di Kota Baubau
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Percentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	98,38%			
Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Percentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah	100%	98,38%	Besarnya target PAD pada Badan Pendapatan Daerah tidak didukung oleh petugas dan anggaran dalam meningkatkan realisasi.	Rendahnya kualitas SDM dan Minimnya Pembiayaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah serta Rendahnya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak mengakibatkan loss potensi pada beberapa potensi-potensi PAD yang dapat dijadikan target PAD.	Menggunakan Sumber Daya yang ada dalam meningkatkan penerimaan PAD di Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau
	SK Wali Kota Baubau No. 657/X/2025 tentang Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Telaah Data Potensi pada Potensi Pajak Daerah untuk di tetapkan di tahun 2026	Penyusunan Telaah Data Potensi dilakukan baru pada Potensi Pajak Daerah belum termasuk Data Potensi Retribusi Daerah disebabkan keterbatasan anggaran	Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas sesuai Juknis pelaksanaan kegiatan, sebagai dasar penyusunan target PAD Tahun 2025 adapun telaah data potensi Retribusi akan diagendakan di tahun 2026

SASARAN	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Peraturan Wali Kota Baubau No. 55 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Detail tentang Rincian Objek dan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	Tersusunnya kebijakan pajak daerah berupa Surat Edaran tentang Pajak PBB, Surat Edaran Pajak PBJT, Mou bersama BPD Sultra tentang Alat Rekam Pajak dll	Terdapat OPD pengampu retribusi daerah yang melakukan perubahan tarif yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan sehingga perlu Perwali baru terkait hal tersebut	Melakukan Pembinaan kepada OPD Pengelola PAD tentang pentingnya Perwali Pajak dan Retribusi Daerah sesuai UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD
	Perjanjian Kerja Besama antara Pemerintah Kota Baubau dengan BPD Sultra tentang Pengembangan Layanan dan Inovasi Teknologi Keuangan serta Penerimaan Daerah Kota Baubau No. 87/KB/HK/2025	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya penyuluhan pajak daerah melalui pembagian SPPT PBB ke kelurahan se-Kota Baubau, penyuluhan rutin kepada WP PBJT, Penyuluhan kepada WP Reklame dll	Penyuluh pajak tidak maksimal sebab kurangnya petugas pajak dan penyediaan pagu belanja pada sub kegiatan penyuluhan dilakukan perubahan sumber dana dari DAU-T menjadi sumber dana PAD sehingga menghambat proses pendanaan program dan kegiatan dan baru terlaksana di bulan Oktober saat DPPA di cairkan.	Walaupun dengan keterbatasan yang ada, Bapenda tetap melakukan Penyuluhan kepada Wajib Pajak baik yang taat pajak ataupun yang tidak taat, untuk tetap melaksanakan kewajibannya
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	3 Unit	Tersedianya Aplikasi Smartgis PBB-P2, Aplikasi Dashboard Realisasi Pajak Daerah, Printer Printonix 1 unit dalam rangka percepatan pelayanan kepada wajib pajak	Kurangnya sarana dan prasarana pajak daerah yang diperlukan untuk memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat	Menyediakan sarana dan prasarana pajak daerah di antaranya Pengadaan Printer pRintonix baru untuk PBB-P2, Pengadaan Aplikasi Dashboard Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah lingkup Bapenda serta untuk memudahkan pendataan dan pengawasan bidang tanah pada PBB-P2 diadakan Aplikasi Smargis PBB_P2
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Terlaksananya pendataan WP dan OP pada PBB, BPHTB, PBTJ dan Pajak lainnya	Pendataan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh sebab kurangnya personil ahli dan penyuluh pajak, terutama pada pendataan pajak opsen. Air tanah, sarang burung walet dan MBLB	Tetap melakukan pendataan kepada jenis pajak baru walaupun tidak maksimal untuk persiapan ketetapan di tahun 2026
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	3 Laporan	Terpeliharanya basis Data SIMPBB, SIM PAD, SIM BPHTB.	Tidak menentunya kerusakan/program yang perlu disinkronisasi pada sistem SIMPAD, SIMPBB dan SIM BPHTB, namun Anggaran tetap harus disediakan	Pelaksanaan Kegiatan tetap Mengacu pada DPPA dan Anggaran Kas, Serta memperhatikan kondisi Aplikasi SIMPAD, SIMPBB dan SIM BPHTB apabila ada program dari Pemerintah yang perlu di upgrade pada sistem.
	Peraturan Walikota Baubau No. 43 Tahun 2025 tentang Penilaian Pajak Bumi dan	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	5000 Obyek Pajak	3240 Obyek Pajak	Terlaksananya penilaian PBB-P2 dan BPHTB terutama pada NJOP yang disesuaikan baik	Luasnya Wilayah Kota Baubau yang mengalami peningkatan nilai NJOP namun personil penilai sangat minim sehingga tidak dapat terpenuhi pada	Tetap melakukan survey pada Bangunan-bangunan baru yang dibangun di Kota Baubau sesuai dengan sumber daya yang ada.

SASARAN	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
	Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				melalui validasi ataupun penilaian Rutin	semua Kelurahan Padat Penduduk.	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Terlaksananya dokumen ketetapan pajak daerah disesuaikan dengan potensi pajak daerah	Banyaknya NJOP Ganda sehingga putang PBB-P2 sangat tinggi setiap tahunnya, selain itu rendahnya tingkat kepatuhan WP Kota Baubau, serta belum adanya ketetapan atas Pajak Air Tanah disebabkan belum keluarnya Pergub tentang PAT Tahun 2025	Memberikan Literasi kepada masyarakat untuk melaporkan setiap jual beli tanah/waris kepada BAPENDA sehingga data NOP ketetapan sesuai dengan data di lapangan, dan melakukan validasi PBB-P2 atas kelurahan dengan perkembangan bangunan yang pesat untuk penilaian kembali PBB-P2, pada pajak lainnya melakukan survey berkala untuk menentukan nilai ketetapan dan mencocokkan nilai verifikasi dengan laporan self assesment wajib pajak lainnya
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2625 Layanan	3390 Layanan	Terlaksananya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah pada Front Desk dan pelayanan lapangan	Kurangnya pendidikan dan pelatihan kepada petugas pelayanan dan front desk di Bapenda dan dokumen kelengkapan dalam pelayanan kurang memadai	Tetap melakukan pelayanan kepada wajib pajak baik yang melakukan konsultasi atau pun membayar sekaligus mengingatkan untuk mengedukasi wajib pajak untuk mengajak Teman atau Keluarga agar membayar Pajak terutangnya di Bapenda
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	60 Dokumen	50 Dokumen	Terlaksananya Laporan secara Rutin kepada BPKAD, MCP KPK dan Beberapa Laporan Pusat Lainnya	Ketidapatuhan atas waktu penyeteroran laporan dan tidak validnya laporan PAD dari OPD pengelola PAD	Koordinasi dengan Bidang Pengelola Pajak termasuk dengan Pihak OPD lainnya yang mengelola Retribusi Daerah dan Kepada BPKAD sebagai Pengelola Dana Transfer
	SK Wali Kota Baubau No. 658/X/2025 tentang Penghapusan Sanksi Administtasi terhadap Denda PBB-P2 dan PBJT dalam rangka hari Jadi HUT Kota Baubau ke 24 Tahun 2025	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Terlaksananya penagihan pajak daerah dengan memperhatikan Potensi yang ada, dan tingginya piutang pajak PBB-P2 mempengaruhi nilai Pendapatan asli daerah	Tingginya Piutang PBB-P2, Pajak Reklame dan Piutang PBJT mempengaruhi nilai Pendapatan asli daerah dan berpotensi tidak dapat tertagih	Penagihan atas Pajak Daerah menjadi tupoksi Badan Pendapatan Daerah, cara terbaik dengan memaksimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi dari sumber-sumber yang ada,terutama pada Piutang PBB-P2 dan PBJT untuk meminimalisir peningkatan Piutang dari besarnya Ketetapan Pajak Daerah yang tidak dapat tertagih.
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	Penyelesaian Keberatan atas WP yang paling sering pada PBB_P2 dan BPHTB dilakukan sesuai dengan	Banyaknya Wajib Pajak yang melakukan keberatan atas PBB-P2 dan BPHTB	Penyelesaian Keberatan Pajak di koordinasikan bersama sub bidang pelayanan dan Konsultasi terutama Keberatan pada PBB-P2 dan BPHTB, Dengan adanya Perpanjangan waktu pembayaran

SASARAN	KEBIJAKAN	URUSAN PROG/KEG	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PENYEBAB KEBERHASILAN	PENYEBAB KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
						Prosedur dan ketentuan yang berlaku		PBB terutang memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk datang membayar ataupun berkonsultasi di Kantor Bapenda
	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau dengan BPD Sultra tentang Pengembangan Layanan Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online Sistem No. 970/501/Bapenda/PKS/2025	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Pengawasan dilakukan secara rutin baik pada PBB-P2 dan BPHTB maupun pada Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah terutama pada penggunaan alat rekam pajak	Tidak patuhnya wajib retribusi membayar pajaknya sesuai dengan NOP yang ditetapkan, rusaknya alat rekam pajak menyebabkan kebocoran Penerimaan Pajak Daerah.	Melakukan Pembinaan kepada OPD Pengelola Retribusi Daerah terutama pada retribusi yang berpotensi terhadap peningkatan retribusi daerah dan menyurati Bank Sultra untuk menyediakan alat rekam pajak
	Surat Edaran Non. 28/SE/HK/2025 tentang Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Elektronifikasi dan Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	Koordinasi bersama Bank Sultra dan Bank BI dilakukan secara berkala pada peningkatan Kanal Digital Pembayaran Pajak dan Retribusi Lainnya	Masih belum Pahaminya Wajib Pajak dan Wajib Retribusi menggunakan kanal pembayaran digital	Melakukan Sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah untuk menggunakan kanal pembayaran via ETPD sehingga capaian ETPD di Kota Baubau dapat meningkat

Sumber: Data LKPJ Bapenda 2025

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. Berikut tabel komposisi belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.16
Komposisi Belanja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau
Tahun Anggaran 2025

No	Jenis Belanja	Tahun 2025		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	50.782.895.000,00	46.408.153.678,00	91,38
	JUMLAH	50.782.895.000,00	46.408.153.678,00	82,23
2	Belanja Operasi	8.834.680.298,00	7.076.671.706,00	80,10
3	Belanja Modal	659.700.000,00	658.039.000,00	99,74
	JUMLAH	9.494.380.298,00	7.734.710.706,00	81,46
	SURPLUS/DEFISIT	41.288.514.702,00	38.673.442.972,00	93,67

Sumber: LRA Bapenda 2025 (Unaudited)

Selanjutnya Realisasi Belanja pada DPA Perubahan Bapenda Kota Baubau Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel 3.17 berikut ini.

Tabel 3.17
Realisasi Belanja
Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				
		Pagu	Realisasi		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%
		(Rp.)	(Rp.)	(%)					
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.266.593.648	5.556.060.926	76,46%					100,00%
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.342.500	86.123.290	99,75%					100,00%
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.009.000	14.955.160	99,64%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100,00%
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.560.000	9.549.600	99,89%	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	9.979.910	99,80%	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00%
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.750.000	7.688.600	99,21%	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100,00%
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.094.000	10.089.000	99,95%	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100,00%
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.791.000	11.761.120	99,75%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,00%
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.140.000	12.130.400	99,92%	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	24	24	100,00%
5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	9.998.500	9.969.500	99,71%	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	2	2	100,00%
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.383.545.848	3.873.885.125	71,96%					100,00%
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.313.642.448	3.809.860.173	71,70%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	910	957	105,16%
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.302.000	27.102.000	86,58%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100,00%
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.064.000	14.936.700	99,15%	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100,00%
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.537.400	21.986.252	93,41%	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				
		Pagu	Realisasi		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%
		(Rp.)	(Rp.)	(%)					
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.257.000	19.504.250	96,28%					100,00%
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.063.000	9.457.250	93,98%	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	2	100,00%
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.194.000	10.047.000	98,56%	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100,00%
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	92.838.900	92.713.200	99,86%					100,00%
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	92.838.900	92.713.200	99,86%	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	12	100,00%
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.178.900	134.038.175	95,62%					100,00%
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	80.150.000	80.150.000	100,00%	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	Paket	1	1	100,00%
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.645.000	25.636.200	99,97%	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	2	100,00%
5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.831.900	25.699.975	99,49%	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	100,00%
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.552.000	2.552.000	29,84%	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	4	100,00%
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.082.500	445.059.460	99,77%					100,00%
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.930.000	99,30%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.578.700	20.516.000	99,70%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.957.480	99,15%	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4	100,00%
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.000.000	157.869.932	99,92%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100,00%	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	100,00%
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	8.000.000	100,00%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	100,00%
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.920.000	25.893.229	99,90%	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100,00%
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.583.800	202.892.819	99,66%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100,00%
02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.900.000	109.575.000	99,70%					100,00%
5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.000.000	18.000.000	100,00%	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1	100,00%
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.900.000	91.575.000	99,65%	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	100,00%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				
		Pagu	Realisasi		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%
		(Rp.)	(Rp.)	(%)					
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	885.130.000	698.771.506	78,95%					100,00%
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	7.990.000	99,88%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00%
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.030.000	175.134.506	97,28%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.100.000	5.100.000	100,00%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100,00%
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	692.000.000	510.547.000	73,78%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00%
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.318.000	96.390.920	94,21%					100,00%
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.290.000	66.981.630	93,96%	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	100,00%
5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	8.133.000	6.588.790	81,01%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	100,00%
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.120.000	8.110.000	99,88%	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12	12	100,00%
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.775.000	14.710.500	99,56%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%
05.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.227.786.650	2.178.649.780	97,79%					98,38%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.227.786.650	2.178.649.780	97,79%					98,38%
5.02.04.2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	114.500.000	109.500.000	95,63%	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	1	100,00%
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	65.000.000	64.928.280	99,89%	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	4	4	100,00%
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	218.378.250	176.365.600	80,76%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	12	12	100,00%
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	567.800.000	566.464.000	99,76%	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		3	3	100,00%
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	85.400.000	85.399.600	100,00%	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	12	100,00%
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	110.000.000	109.890.000	99,90%	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	3	100,00%
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta	232.592.000	232.564.600	99,99%	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	5000	3240	64,80%

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN			INDIKATOR KINERJA				
		Pagu	Realisasi		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%
		(Rp.)	(Rp.)	(%)					
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)								
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	279.570.400	279.363.900	99,93%	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100,00%
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	67.000.000	66.985.600	99,98%	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	2625	3390	129,14%
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	70.000.000	69.765.300	99,66%	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	60	50	83,33%
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	213.600.000	213.534.250	99,97%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100,00%
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	40.000.000	39.990.000	99,98%	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	100,00%
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	101.229.000	101.218.650	99,99%	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	12	100,00%
5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	62.717.000	62.680.000	99,94%	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	12	12	100,00%
TOTAL (Rp.)		9.494.380.298	7.734.710.706	81,47%	Persentase Total Kinerja				99,19%

Sumber: LPPK Bapenda 2025

Capaian atas target belanja pada tahun 2025 sebesar 81,47% dari total belanja yang ditargetkan senilai Rp9.494.380.298,00 yang dapat terealisasi senilai Rp7.734.710.706,00 dengan persentase capaian kinerja 99,19%. Capaian tersebut disebabkan tidak terealisasinya anggaran Insentif atas Pajak dan Retribusi Daerah pada Belanja Pegawai dan belanja Barang Jasa bagi Non ASN disebabkan capaian 100% atas realisasi Pajak Daerah akan dicairkan pada Triwulan I Tahun 2026.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025. Pengukuran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau Tahun 2025, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2025.

Adapun Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis yang ditargetkan sesuai Indikator Sasaran Strategis pada 5 (Lima) Indikator Tujuan dan Sasaran memperoleh rata-rata Persentase Capaian sebesar 111,13% dengan kategori Sangat baik (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Peningkatan capaian atas Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah perlu didorong lebih baik lagi di tahun mendatang dengan memberikan dukungan baik penyediaan sarana dan prasana, perbaikan sistem dan prodesur digital ataupun peningkatan kapasitas Sumber daya Manusia dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan Pendapatan Daerah.

Baubau, Februari 2026

**Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota
Baubau**



MUHAMMAD MASSAD, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710418 200212 1 006

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BAUBAU YANG DIKELOLA
BADAN DAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%
1.	5.02.0.00.0.00.03.0.000	Badan Pendapatan Daerah	50.782.895.000,00	46.408.153.678,00	91,39%
	4.1.01	Pajak Daerah	50.275.000.000,00	45.999.864.769,00	91,50%
	4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.032.722.250,00	103,27%
	4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.032.722.250,00	103,27%
	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.032.722.250,00	103,27%
	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.500.000.000,00	8.589.878.898,00	90,42%
	4.1.01.15.01	PBBP2	9.500.000.000,00	8.589.878.898,00	90,42%
	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.500.000.000,00	8.589.878.898,00	90,42%
	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000.000.000,00	6.740.408.240,00	96,29%
	4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	6.000.000.000,00	6.341.461.290,00	105,69%
	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	6.341.461.290,00	105,69%
	4.1.01.16.01	BPHTB-Pemberian Hak baru	1.000.000.000,00	398.946.950,00	39,89%
	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemberian Hak baru	1.000.000.000,00	398.946.950,00	39,89%
	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	19.650.000.000,00	20.351.628.578,00	103,57%
	4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.000.000.000,00	6.344.122.756,00	105,74%
	4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	6.000.000.000,00	6.344.122.756,00	105,74%
	4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	11.400.000.000,00	11.499.863.240,00	100,88%
	4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	11.400.000.000,00	11.499.863.240,00	100,88%
	4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.500.000.000,00	1.756.330.424,00	117,09%
	4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.500.000.000,00	1.756.330.424,00	117,09%
	4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	200.000.000,00	209.811.154,00	104,91%
	4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	200.000.000,00	209.811.154,00	104,91%
	4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	550.000.000,00	541.501.004,00	98,45%
	4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	400.000.000,00	392.711.819,00	98,18%
	4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan (<i>Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor</i>)	35.000.000,00	35.087.000,00	100,25%
	4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran (<i>Bilyard dan Bowling</i>)	33.906.000,00	35.102.100,00	103,53%
	4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	16.094.000,00	8.047.000,00	50,00%
	4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	1.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	64.000.000,00	70.553.085,00	110,24%
	4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.500.000.000,00	4.925.127.561,00	75,77%
	4.1.01.20.01	Opsen PKB	6.500.000.000,00	4.925.127.561,00	75,77%
	4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	6.500.000.000,00	4.925.127.561,00	75,77%
	4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.500.000.000,00	4.360.099.242,00	67,08%
	4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	6.500.000.000,00	4.360.099.242,00	67,08%
	4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	6.500.000.000,00	4.360.099.242,00	67,08%
	4.1.02	Retribusi Daerah	200.000.000,00	158.799.000,00	79,40%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	158.799.000,00	79,40%
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	158.799.000,00	79,40%
	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	200.000.000,00	158.799.000,00	79,40%
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	307.895.000,00	249.489.909,00	81,03%
	4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	50.000,00	197.000,00	394,00%
	4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	50.000,00	197.000,00	394,00%
	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	50.000,00	197.000,00	394,00%
	4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	307.845.000,00	249.292.909,00	80,98%
	4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.115.365,00	55,77%
	4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.115.365,00	55,77%
	4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	50.845.000,00	35.100.642,00	69,03%
	4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	50.845.000,00	35.100.642,00	69,03%
	4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.000.000,00	153.000,00	15,30%
	4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	850.000,00	119.600,00	14,07%
	4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	125.000,00	17.000,00	13,60%
	4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	25.000,00	12.400,00	49,60%
	4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	-	4.000,00	0,00%
	4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.500.000,00	3.655.753,00	0,00%
	4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.500.000,00	3.655.753,00	243,72%
	4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000,00	1.810.163,00	0,00%
	4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000,00	1.810.163,00	72,41%

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	250.000.000,00	193.432.888,00	77,37%
	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	250.000.000,00	193.432.888,00	77,37%
	4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	14.025.098,00	0,00%
	4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	-	14.025.098,00	0,00%
2	5.02.0.00.0.00.02.0000	BPKAD	28.544.808.500,00	29.649.249.576,00	103,87%
	4.1.03	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.767.621.433,00	18.872.062.509,00	106,22%
	4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	265.000.000,00	385.193.500,00	145,36%
	4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	265.193.500,00	176,80%
	4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.000.000,00	265.193.500,00	176,80%
	4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	115.000.000,00	120.000.000,00	104,35%
	4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	115.000.000,00	-	0,00%
	4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	120.000.000,00	0,00%
	4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.300.000.000,00	1.381.502.124,00	106,27%
	4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	150.000.000,00	204.004.426,00	136,00%
	4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	150.000.000,00	204.004.426,00	136,00%
	4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.150.000.000,00	1.177.497.698,00	102,39%
	4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangunan Guna Serah	1.150.000.000,00	1.177.497.698,00	102,39%
	4.1.04.05	Jasa Giro	1.130.000.000,00	1.712.708.397,00	151,57%
	4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.610.718.896,00	161,07%
	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.610.718.896,00	161,07%
	4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	30.491.377,00	60,98%
	4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	30.491.377,00	60,98%
	4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	38.104.625,00	76,21%
	4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	38.104.625,00	76,21%
	4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	30.000.000,00	33.393.499,00	111,31%
	4.1.04.05.07.0001	pendapatan Jasa Giro pada RekeningDana BOK Puskesmas	30.000.000,00	33.393.499,00	111,31%
	4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.000.000,00	26.606.944,00	266,07%
	4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000,00	26.606.944,00	266,07%
	4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000,00	26.606.944,00	266,07%
	4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.400.000.000,00	3.391.861.619,00	99,76%
	4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	150.000.000,00	153.508.050,00	102,34%
	4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	150.000.000,00	153.508.050,00	102,34%
	4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.250.000.000,00	3.238.353.569,00	99,64%
	4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.250.000.000,00	3.238.353.569,00	99,64%
	4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.471.189.579,00	9.486.582.818,00	100,16%
	4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.471.189.579,00	9.486.582.818,00	100,16%
	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.471.189.579,00	9.486.582.818,00	100,16%
	4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.431.854,00	112.123.745,00	270,62%
	4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.431.854,00	112.123.745,00	270,62%
	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.431.854,00	112.123.745,00	270,62%
	4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.150.000.000,00	2.375.483.362,00	110,49%
	4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.750.000.000,00	1.682.809.237,00	96,16%
	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.750.000.000,00	1.682.809.237,00	96,16%
	4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	400.000.000,00	682.424.125,00	170,61%
	4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	400.000.000,00	681.908.484,00	170,48%
	4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	19.713,00	0,00%
	4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	-	59.141,00	0,00%
	4.1.04.15.08.0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS	-	436.787,00	0,00%
	4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	10.250.000,00	0,00%
	4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	10.250.000,00	0,00%

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
3	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	55.809.164.000,00	59.226.804.295,00	106,12%
	4.1.02	Retribusi Daerah	809.164.000,00	795.426.700,00	98,30%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	809.164.000,00	795.426.700,00	98,30%
	4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	809.164.000,00	795.426.700,00	98,30%
	4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	605.164.000,00	530.269.000,00	87,62%
	4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkesda)	204.000.000,00	265.157.700,00	129,98%
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	55.000.000.000,00	58.431.377.595,00	106,24%
	4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	2.174.255.000,00	0,00%
	4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	2.174.255.000,00	0,00%
	4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	2.174.255.000,00	0,00%
	4.1.04.16	Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	56.257.122.595,00	102,29%
	4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	55.000.000.000,00	56.257.122.595,00	102,29%
	4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	55.000.000.000,00	56.257.122.595,00	102,29%
4	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.000.000,00	63.250.000,00	19,77%
	4.1.02	Retribusi Daerah	320.000.000,00	63.250.000,00	19,77%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	20.000.000,00	11.800.000,00	59,00%
	4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	11.800.000,00	59,00%
	4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	11.800.000,00	59,00%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	300.000.000,00	51.450.000,00	17,15%
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	300.000.000,00	51.450.000,00	17,15%
	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	51.450.000,00	17,15%
5	1.04.2.10.0.00.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
	4.1.02	Retribusi Daerah	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan- Rusunawa	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
6	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
	4.1.02	Retribusi Daerah	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
7	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	581.532.500,00	523.913.010,00	90,09%
	4.1.02	Retribusi Daerah	581.532.500,00	523.913.010,00	90,09%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	91.212.500,00	36.057.000,00	39,53%
	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	11.100.000,00	12.326.000,00	111,05%
	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	11.100.000,00	12.326.000,00	111,05%
	4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.112.500,00	23.731.000,00	29,62%
	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.112.500,00	23.731.000,00	29,62%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	490.320.000,00	487.856.010,00	99,50%
	4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	170.120.000,00	111.173.000,00	65,35%
	4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	170.120.000,00	111.173.000,00	65,35%
	4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	320.200.000,00	376.683.010,00	117,64%
	4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	320.200.000,00	376.683.010,00	117,64%
8	2.18.0.00.0.00.02.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
	4.1.02	Retribusi Daerah	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
	4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
	4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
9	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	931.800.000,00	363.465.000,00	39,01%
	4.1.02	Retribusi Daerah	714.000.000,00	219.035.000,00	30,68%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	714.000.000,00	219.035.000,00	30,68%
	4.1.02.02.03	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	564.000.000,00	144.235.000,00	25,57%
	4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya ditempat Pelelangan - Hasil Penjualan Es Balok	564.000.000,00	144.235.000,00	25,57%
	4.1.02.02.13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	150.000.000,00	74.800.000,00	49,87%
	4.1.02.02.13.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - Retribusi Penyediaan TPI Wameo	150.000.000,00	74.800.000,00	49,87%
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	217.800.000,00	144.430.000,00	66,31%
	4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	217.800.000,00	144.430.000,00	66,31%
	4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	217.800.000,00	144.430.000,00	66,31%
	4.1.04.01.05.0055	Hasil Penjualan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya) - Hasil Penjualan Biota Perairan (Udang Vaname)	217.800.000,00	144.430.000,00	66,31%

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya - Retribusi Kios Sentra Kuliner Depan Islamic Centre	-	-	
10	3.26.2.22.0.00.01.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
	4.1.02	Retribusi Daerah	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
	4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
	4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
11	3.27.2.09.0.00.01.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
	4.1.02	Retribusi Daerah	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
	4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
	4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
12	3.27.2.09.0.00.01.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
	4.1.02	Retribusi Daerah	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
	4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	200.000.000,00	81.781.000,00	40,89%
	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	836.000.000,00	774.250.000,00	92,61%
		Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%

Baubau, 31 Desember 2025

Mengetahui:

Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BAUBAU,

Drs. MUSRIFI, M.Si
NIP. 19731206 1993002 1 001

RINGKASAN LRA PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2025

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
		PENDAPATAN ASLI DAERAH	142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%
		Pajak Daerah	50.275.000.000,00	45.999.864.769,00	91,50%
		Retribusi Daerah	7.654.496.500,00	6.382.999.045,00	83,39%
		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
		Lain-lain PAD yang Sah	73.293.316.433,00	77.697.360.013,00	106,01%
			142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%

RINGKASAN REKENING PAJAK DAERAH

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
	4.1.01	Pajak Daerah	50.275.000.000,00	45.999.864.769,00	91,50%
	4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.032.722.250,00	103,27%
	4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.032.722.250,00	103,27%
	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000,00	1.032.722.250,00	103,27%
	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	110.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	15.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.500.000.000,00	8.589.878.898,00	90,42%
	4.1.01.15.01	PBBP2	9.500.000.000,00	8.589.878.898,00	90,42%
	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.500.000.000,00	8.589.878.898,00	90,42%
	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.000.000.000,00	6.740.408.240,00	96,29%
	4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	6.000.000.000,00	6.341.461.290,00	105,69%
	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	6.000.000.000,00	6.341.461.290,00	105,69%
	4.1.01.16.01	BPHTB-Pemberian Hak baru	1.000.000.000,00	398.946.950,00	39,89%
	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemberian Hak baru	1.000.000.000,00	398.946.950,00	39,89%
	4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	19.650.000.000,00	20.351.628.578,00	103,57%
	4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	6.000.000.000,00	6.344.122.756,00	105,74%
	4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	6.000.000.000,00	6.344.122.756,00	105,74%
	4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	11.400.000.000,00	11.499.863.240,00	100,88%
	4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	11.400.000.000,00	11.499.863.240,00	100,88%
	4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.500.000.000,00	1.756.330.424,00	117,09%
	4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	1.500.000.000,00	1.756.330.424,00	117,09%
	4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	200.000.000,00	209.811.154,00	104,91%
	4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	200.000.000,00	209.811.154,00	104,91%
	4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	550.000.000,00	541.501.004,00	98,45%

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	400.000.000,00	392.711.819,00	98,18%
	4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan (<i>Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor</i>)	35.000.000,00	35.087.000,00	100,25%
	4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran (<i>Bilvard dan Bowling</i>)	33.906.000,00	35.102.100,00	103,53%
	4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	16.094.000,00	8.047.000,00	50,00%
	4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	1.000.000,00	-	0,00%
	4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	64.000.000,00	70.553.085,00	110,24%
	4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.500.000.000,00	4.925.127.561,00	75,77%
	4.1.01.20.01	Opsen PKB	6.500.000.000,00	4.925.127.561,00	75,77%
	4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	6.500.000.000,00	4.925.127.561,00	75,77%
	4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.500.000.000,00	4.360.099.242,00	67,08%
	4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	6.500.000.000,00	4.360.099.242,00	67,08%
	4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	6.500.000.000,00	4.360.099.242,00	67,08%
		TOTAL PAJAK DAERAH	50.275.000.000,00	45.999.864.769,00	91,50%

RINGKASAN REKENING RETRIBUSI DAERAH

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
	4.1.02	Retribusi Daerah	7.654.496.500,00	6.382.999.045,00	83,39%
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.756.376.500,00	3.232.248.700,00	86,05%
	4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	809.164.000,00	795.426.700,00	98,30%
	4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	605.164.000,00	530.269.000,00	87,62%
	4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Lainnya (Labkesda)	204.000.000,00	265.157.700,00	129,98%
	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.811.100.000,00	1.545.260.000,00	85,32%
	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.811.100.000,00	1.545.260.000,00	85,32%
	4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.112.500,00	23.731.000,00	29,62%
	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	80.112.500,00	23.731.000,00	29,62%
	4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	200.000.000,00	81.781.000,00	40,89%
	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	836.000.000,00	774.250.000,00	92,61%
	4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	11.800.000,00	59,00%
	4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.000.000,00	11.800.000,00	59,00%
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.798.120.000,00	2.037.155.010,00	72,80%
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.356.200.000,00	1.092.974.000,00	80,59%
	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.056.200.000,00	1.041.524.000,00	98,61%
	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00	51.450.000,00	17,15%
	4.1.02.02.03	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	564.000.000,00	144.235.000,00	25,57%
	4.1.02.02.03.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya ditempat Pelelangan - Hasil Penjualan Es Balok	564.000.000,00	144.235.000,00	25,57%
	4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	170.120.000,00	111.173.000,00	65,35%
	4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	170.120.000,00	111.173.000,00	65,35%
	4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
	4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
	4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	320.200.000,00	376.683.010,00	117,64%
	4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	320.200.000,00	376.683.010,00	117,64%
	4.1.02.02.13	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	150.000.000,00	74.800.000,00	49,87%
	4.1.02.02.13.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - Retribusi Penyediaan TPI Wameo	150.000.000,00	74.800.000,00	49,87%
	4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
	4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
	4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
	4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
		TOTAL RETRIBUSI DAERAH	7.654.496.500,00	6.382.999.045,00	83,39%

RINGKASAN REKENING HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%
	4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
		TOTAL HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	10.777.187.067,00	10.777.187.067,00	100,00%

RINGKASAN REKENING LAIN-LAIN PAD YANG SAH

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	S/D BULAN INI	%
				(Rp)	
	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	73.293.316.433,00	77.697.360.013,00	106,01%
	4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	482.800.000,00	529.623.500,00	109,70%
	4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	265.193.500,00	176,80%
	4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.000.000,00	265.193.500,00	176,80%
	4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	217.800.000,00	144.430.000,00	66,31%
	4.1.04.01.05.0055	Hasil Penjualan Biota Perairan-Crustacea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)-Crustacea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya) - Hasil Penjualan Biota Perairan (Udang Vaname)	217.800.000,00	144.430.000,00	66,31%
	4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	115.000.000,00	120.000.000,00	104,35%
	4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	115.000.000,00	-	0,00%
	4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	120.000.000,00	0,00%
	4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.300.000.000,00	1.381.502.124,00	106,27%
	4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	150.000.000,00	204.004.426,00	136,00%
	4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	150.000.000,00	204.004.426,00	136,00%
	4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	1.150.000.000,00	1.177.497.698,00	102,39%
	4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bagunan Guna Serah	1.150.000.000,00	1.177.497.698,00	102,39%
	4.1.04.05	Jasa Giro	1.130.000.000,00	1.712.708.397,00	151,57%
	4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.610.718.896,00	161,07%
	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.610.718.896,00	161,07%
	4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	30.491.377,00	60,98%
	4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	30.491.377,00	60,98%
	4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	38.104.625,00	76,21%
	4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	50.000.000,00	38.104.625,00	76,21%
	4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	30.000.000,00	33.393.499,00	111,31%
	4.1.04.05.07.0001	pendapatan Jasa Giro pada RekeningDana BOK Puskesmas	30.000.000,00	33.393.499,00	111,31%
	4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.000.000,00	26.606.944,00	266,07%
	4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000,00	26.606.944,00	266,07%
	4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000,00	26.606.944,00	266,07%
	4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.400.000.000,00	3.391.861.619,00	99,76%
	4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	150.000.000,00	153.508.050,00	102,34%
	4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	150.000.000,00	153.508.050,00	102,34%
	4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.250.000.000,00	3.238.353.569,00	99,64%
	4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.250.000.000,00	3.238.353.569,00	99,64%
	4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.471.239.579,00	9.486.779.818,00	100,16%
	4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.471.239.579,00	9.486.779.818,00	100,16%
	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	9.471.239.579,00	9.486.779.818,00	100,16%
	4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.431.854,00	112.123.745,00	270,62%
	4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.431.854,00	112.123.745,00	270,62%
	4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	41.431.854,00	112.123.745,00	270,62%
	4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	307.845.000,00	249.292.909,00	80,98%
	4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.115.365,00	55,77%
	4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	1.115.365,00	55,77%
	4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	50.845.000,00	35.100.642,00	69,03%
	4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	50.845.000,00	35.100.642,00	69,03%
	4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.000.000,00	153.000,00	15,30%
	4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	850.000,00	119.600,00	14,07%
	4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	125.000,00	17.000,00	13,60%
	4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	25.000,00	12.400,00	49,60%
	4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	-	4.000,00	0,00%
	4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	1.500.000,00	3.655.753,00	243,72%
	4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	1.500.000,00	3.655.753,00	243,72%
	4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000,00	1.810.163,00	72,41%
	4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.500.000,00	1.810.163,00	72,41%
	4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	250.000.000,00	193.432.888,00	77,37%

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	250.000.000,00	193.432.888,00	77,37%
	4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	14.025.098,00	0,00%
	4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	-	14.025.098,00	0,00%
	4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	2.150.000.000,00	2.375.483.362,00	110,49%
	4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.750.000.000,00	1.682.809.237,00	96,16%
	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	1.750.000.000,00	1.682.809.237,00	96,16%
	4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	400.000.000,00	682.424.125,00	170,61%
	4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	400.000.000,00	681.908.484,00	170,48%
	4.1.04.15.08.0019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN-Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	-	19.713,00	0,00%
	4.1.04.15.08.0021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN-Iuran Jaminan Kematian PNS	-	59.141,00	0,00%
	4.1.04.15.08.0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS	-	436.787,00	0,00%
	4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	10.250.000,00	0,00%
	4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	10.250.000,00	0,00%
	4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	2.174.255.000,00	0,00%
	4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	2.174.255.000,00	0,00%
	4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	2.174.255.000,00	0,00%
	4.1.04.16	Pendapatan BLUD	55.000.000.000,00	56.257.122.595,00	102,29%
	4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	55.000.000.000,00	56.257.122.595,00	102,29%
	4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	55.000.000.000,00	56.257.122.595,00	102,29%
		TOTAL LAIN-LAIN PAD YANG SAH	73.293.316.433,00	77.697.360.013,00	106,01%

REALISASI PER OPD

NO.	KODE REKENING	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
			(Rp.)	(Rp.)	%
01	5.02.0.00.0.00.03.00	Badan Pendapatan Daerah	50.782.895.000,00	46.408.153.678,00	91,39%
02	5.02.0.00.0.00.02.00	BPKAD	28.544.808.500,00	29.649.249.576,00	103,87%
03	1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	55.809.164.000,00	59.226.804.295,00	106,12%
04	1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.000.000,00	63.250.000,00	19,77%
05	1.04.2.10.0.00.01.00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	856.200.000,00	882.725.000,00	103,10%
06	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	1.800.000.000,00	1.532.934.000,00	85,16%
07	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	581.532.500,00	523.913.010,00	90,09%
08	2.18.0.00.0.00.02.00	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.100.000.000,00	1.113.595.335,00	101,24%
09	3.25.0.00.0.00.01.00	Dinas Perikanan	931.800.000,00	363.465.000,00	39,01%
10	3.26.2.22.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	181.350.000,00	184.190.000,00	101,57%
11	3.27.2.09.0.00.01.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.250.000,00	53.100.000,00	94,40%
12	3.27.2.09.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.036.000.000,00	856.031.000,00	82,63%
		TOTAL	142.000.000.000,00	140.857.410.894,00	99,20%

Baubau, 31 Desember 2025

Mengetahui:

PK. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KOTA BAUBAU

Drs. MUSRIFI, M.Si

NIP.1973120819930021001